

**PENGARUH BELANJA MODAL, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN
PENDAPATAN TRANSFER TERHADAP PENDAPATAN PERKAPITA DI
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
(S.Akun) Pada Jurusan Akuntansi Syariah

Oleh:

FEBBY KURNIA RAHMADHANI

NIM 52153061

Program Studi
Akuntansi Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

ABSTRAK

Febby Kurnia Rahmadhani (2019), Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Perkapita Di Kota Medan. Dengan Pembimbing Skripsi I Dr. Marliyah, MA dan Pembimbing Skripsi II Rahmat Daim Harahap, M.Ak

Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Kenyataan yang terjadi dalam pemerintah daerah saat ini adalah peningkatan Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer tidak diikuti dengan meningkatnya pendapatan rata-rata penduduk di Kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Perkapita di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Data bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran tahun 2013-2017 yang di ambil dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Berdasarkan hasil uji signifikan parametrik (Uji T) untuk variabel Belanja Modal diperoleh t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} yaitu $1,36991 < 2,00324$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Perkapita. Variabel PAD diketahui t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu $3,40264 > 2,00324$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Perkapita. Variabel Pendapatan Transfer diketahui t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} yaitu $1,12916 < 2,00324$. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Transfer tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Perkapita. Berdasarkan uji Simultan (F) diketahui bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($174,6717 > 2,77$). Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Transfer secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Perkapita.

Kata Kunci: Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Perkapita

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala limpahan anugerah dan rahmat yang diberikan-Nya sehingga penelitian skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Tidak lupa sholawat serta salam kepada Rasulullah SAW yang merupakan tauladan dalam kehidupan manusia menuju jalan yang diridhoi Allah SWT. Skripsi ini berjudul **“PENGARUH BELANJA MODAL, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PENDAPATAN TRANSFER TERHADAP PENDAPATAN PERKAPITA DI KOTA MEDAN”** diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Akuntansi pada Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Teristimewa kepada Ayahanda Surian dan Ibunda tercinta Suryani , penulis mengucapkan terima kasih atas pengorbanan dalam mendidik dan membesarkan, memberikan doa, cinta, kasih sayang, nasihat dan semangat serta dukungan yang tak ternilai harganya demi kelancaran dan keberhasilan penulis dalam berbagai hal terkhusus untuk penyelesaian skripsi ini. Dan tak lupa pula kepada Adikku Denny Novandy yang selalu membantu penulis.
2. Prof. Dr. H. Saidurrahman, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Marliyah, MA selaku Pembimbing Skripsi I dan Bapak Rahmat Daim Harahap, M.Ak selaku Pembimbing Skripsi II ditengah-tengah kesibukannya telah meluangkan waktu untuk memberikan motivasi bagi penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Bapak Hendra Harmain, M.Pd, selaku Ketua Jurusan akuntansi syariah yang telah membimbing penulis dan memberikan nasihat.

6. Ibu Kusmilawati, SE, Ak, M.Ak selaku sekretaris jurusan akuntansi syariah yang banyak memberikan pelayanan dan membantu penulis selama penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Kamilah, SE, Ak, M.Si selaku penasehat akademik yang telah membimbing penulis menyelesaikan skripsi dengan baik.
8. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Serta seluruh civitas akademik atas bimbingan, bantuan dan layanan yang diberikan.
9. Sahabat – sahabat sampai surga Annisa Prastiwi, Aisyah Rianda Gewa, Hanifa, Hanisya Ursilla Lubis, Rida Eka Anugrah dan Siti Abedah Hasibuan yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kekasih tercinta dan tersayang “Skripsweet” Wisnu Abdi Wardana yang selalu membantu, memotivasi, mendoakan dan yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan jurusan akuntansi syariah A angkatan 2015.
12. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis tuliskan namanya satu-persatu yang telah berkenan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis telah berupaya dengan sebaik mungkin dalam penyelesaian skripsi ini. Namun penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga isi skripsi ini dapat bermanfaat dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Medan, Juli 2019

Penulis

Febby Kurnia Rahmadhani

NIM. 52153061

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	4
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Batasan Masalah	4
D. Rumusan Masalah	4
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	6
A. Pendapatan perkapita.....	6
B. Belanja Modal.....	30
C. Pendapatan Asli Daerah.....	34
D. Pendapatan Transfer	47
E. Hubungan Variabel	52
F. Kajian Terdahulu.....	54
G. Kerangka Teoritis	57
H. Hipotesis	58
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	60
A. Pendekatan Penelitian.....	60
B. Lokasi Penelitian	60

C. Waktu Penelitian.....	60
D. Populasi dan Sampel.....	61
E. Jenis dan Sumber Data.....	62
F. Teknik Pengumpulan Data.....	62
G. Definisi Operasional.....	63
H. Teknik Analisis Data.....	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A. Gambaran Umum Instansi.....	69
B. Deskripsi Data Penelitian	81
C. Hasil Penelitian.....	85
D. Pembahasan	98
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapata Perkapita di Kota Medan.....	3
Tabel 2.1 Ringkasan Kajian Terdahulu.....	54
Tabel 3.1 Rincian Waktu Penelitian.....	61
Tabel 4.1 Belanja Modal Bulanan.....	81
Tabel 4.2 Pendapatan Asli Daerah Bulanan.....	82
Tabel 4.3 Pendapatan Transfer Bulanan.....	83
Tabel 4.4 Pendapatan Perkapita Bulanan.....	84
Tabel 4.5 Hasil Analisis Deskriptif.....	85
Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas.....	86
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas.....	87
Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	89
Tabel 4.9 Hasil Uji Autokolerasi.....	91
Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	92
Tabel 4.11 Hasil Uji Koefisien Determinasi R_2	94
Tabel 4.12 Hasil Uji F.....	95
Tabel 4.13 Hasil Uji T.....	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Teoritis.....	58
Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPKAD Kota Medan.....	71
Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia mengacu pada undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Kedua undang-undang dibidang otonomi daerah tersebut telah menetapkan pemberian kewenangan otonomi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah. Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintah dan antar pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjelaskan peran tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan¹.

Sumber penerimaan daerah terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, Pendapatan Asli Daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak, sumbangan dan bantuan, serta penerimaan pembangunan². Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Fenomena umum permasalahan yang dihadapi daerah pada umumnya terkait dengan penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah yang merupakan salah satu komponen PAD diakui masih belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap anggaran pendapatan dan belanja (APBD) khususnya bagi daerah

¹Muindro Renyowijoyo, *Akuntansi Sektor Publik Non Laba*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2008), hal. 221.

² *Ibid.*

kabupaten dan kota. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan pemungutan baru yang semula diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut³.

Belanja daerah merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kewenangan daerah. Pesatnya pembangunan daerah yang menyangkut perkembangan kegiatan fiskal yang membutuhkan alokasi dana dari pemerintah daerah mengakibatkan pembiayaan pada pos belanja yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan membutuhkan tersedianya dana yang besar pula untuk membiayai kegiatan tersebut. Dengan terpenuhinya kebutuhan belanja pemerintah, maka diharapkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi lebih baik dan kesejahteraan masyarakat menjadi meningkat. Pembangunan infrastruktur dan pemberian berbagai fasilitas kemudahan dilakukan untuk meningkatkan daya tarik investasi. Pembangunan infrastruktur industri mempunyai dampak yang nyata terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diperbaiki melalui perbaikan manajemen kualitas jasa (*service quality management*), yakni upaya meminimisasi kesenjangan antara tingkat layanan dengan harapan konsumen⁴.

Pendapatan Transfer merupakan sisi penerimaan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dimana penerimaan akan terhimpun menjadi modal. Selanjutnya melalui modal tersebut maka daerah akan melakukannya untuk belanja pembangunan sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut. Pembangunan ekonomi ditandai dengan meningkatnya produktivitas dan pendapatan perkapita penduduk

³ *Ibid.*, hal. 223.

⁴ Bastian Indra, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hal. 109.

sehingga terjadi perbaikan kesejahteraan. Kenyataan yang terjadi dalam pemerintah daerah saat ini adalah peningkatan Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer tidak diikuti dengan meningkatnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah.

Tabel 1.1
Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan
Pendapatan Perkapita di Kota Medan
Tahun Anggaran 2013-2017

Tahun	Belanja Modal (Rp)	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Pendapatan Perkapita (Rp)
2013	630.802.958.785,00	1.206.169.709.147,73	2.060.845.776.012,00	52.182.975,08
2014	783.883.177.721,63	1.384.246.114.729,62	2.657.869.713.502,00	53.636.490,01
2015	916.888.037.907,78	1.489.723.189.088,60	2.769.321.301.626,82	56.214.865,06
2016	936.599.131.961,06	1.535.259.539.3056,01	2.772.807.342.010,00	52.582.948,01
2017	997.475.991.902,00	1.739.756.922.633,50	2.669.308.559.567,00	48.432.644,07

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan dan Situs BPS Kota Medan (data diolah kembali)

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwasannya Belanja Modal Dan Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2013-2017 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meningkatnya PAD dapat berpengaruh kepada anggaran Belanja Modal yang semakin besar setiap tahunnya. Dengan bertambahnya Belanja Modal maka akan berdampak pada produktivitas masyarakat meningkat dan akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini juga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya peningkatan Pendapatan Perkapita masyarakat. Pada tahun 2013-2015 peningkatan Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan mampu meningkatkan Pendapatan Perkapita masyarakat. Tetapi pada tahun 2016-2017, peningkatan Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah tidak diikuti dengan meningkatnya Pendapatan Perkapita masyarakat, realitanya malah semakin menurun. Kemudian pada tahun 2013 sampai dengan 2016 Pendapatan Transfer mengalami kenaikan setiap

tahunnya tetapi mengalami penurunan pada tahun 2017. Tetapi pada tahun 2016 kenaikan Pendapatan Transfer belum mampu meningkatkan Pendapatan Perkapita di Kota Medan.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“PENGARUH BELANJA MODAL, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PENDAPATAN TRANSFER TERHADAP PENDAPATAN PERKAPITA DI KOTA MEDAN (2013-2017)”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Belanja Modal meningkat namun Pendapatan Perkapita menurun pada tahun 2016 dan 2017.
2. Pendapatan Asli Daerah meningkat namun Pendapatan Perkapita menurun pada tahun 2016 dan 2017.
3. Pendapatan Transfer meningkat namun Pendapatan Perkapita menurun pada tahun 2016.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah yang akan diteliti hanya menganalisis Laporan Realisasi Anggaran tahunan pada bagian Belanja modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer yang mempengaruhi Pendapatan Perkapita di Kota Medan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada penelitian yang telah di kemukakan diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Pendapatan Perkapita di Kota Medan?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Pendapatan Perkapita di Kota Medan?
3. Apakah Pendapatan Transfer berpengaruh terhadap Pendapatan Perkapita di Kota Medan?

4. Apakah Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer berpengaruh secara simultan terhadap Pendapatan Perkapita di Kota Medan?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Perkapita secara parsial di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Perkapita secara simultan di Kota Medan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah

1. Bagi peneliti sebagai bahan masukan mengenai pengaruh belanja modal, pendapatan asli daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer terhadap pendapatan perkapita yang ada di daerah.
2. Bagi pemerintah sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendapatan perkapita masyarakat.
3. Bagi pihak lain dapat dijadikan sebagai referensi dan sumber informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita menurut Sadono Sukirno adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara pada satu tahun tertentu dengan jumlah penduduk negara pada tahun tersebut⁵.

Menurut Muana Nanga pendapatan perkapita merupakan pendapatan agregat (yang berasal dari berbagai sumber) yang secara aktual diterima oleh seseorang atau rumah tangga⁶. Untuk mengukur kondisi seseorang atau rumah tangga, salah satu pokok yang paling sering digunakan yaitu melalui tingkat pendapatannya. Pendapatan menunjukkan seluruh uang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi. Dari beberapa pendapat diatas bahwa yang dimaksud dengan pendapatan perkapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada periode tertentu (umumnya satu tahun).

Pendapatan perkapita dipengaruhi oleh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan jumlah penduduk, dengan kata lain pendapatan perkapita mencerminkan pendapatan rata-rata yang diperoleh di suatu daerah, sehingga jika pendapatan tersebut besar, masyarakat cenderung memiliki pengeluaran yang lebih besar untuk kebutuhannya, sehingga dapat memenuhi kebutuhannya.

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga berlaku pada setiap tahun. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur

⁵Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Modern, Edisi Pertama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 416.

⁶*Ibid.*, hal. 15.

ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Pendapatan perkapita pada dasarnya mengukur kemampuan dari suatu daerah untuk memperbesar outputnya dalam laju yang lebih cepat dari pada tingkat pertumbuhan penduduknya. Tingkat dan laju pertumbuhan pendapatan perkapita sering digunakan untuk mengukur kemakmuran suatu daerah, yaitu seberapa banyak barang dan jasa yang tersedia bagi rata-rata penduduk untuk melakukan kegiatan konsumsi dan investasi. Indikator pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dianggap tidak selalu tepat karena tidak mencerminkan makna pertumbuhan yang sebenarnya. Lebih lanjut disebutkan bahwa indikator pendapatan perkapita lebih komprehensif dalam mengukur pertumbuhan ekonomi karena lebih menekankan kemampuan daerah untuk meningkatkan PDRB. Karena secara simultan menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi mampu meningkatkan kesejahteraan seiring dengan laju pertumbuhan penduduk.

Fungsi lain pendapatan perkapita dalam analisis pembangunan ekonomi adalah menggambarkan jurang tingkat kemakmuran diberbagai negara. Dalam konteks ini diasumsikan tingkat kemakmuran suatu negara direfleksikan oleh pendapatan rata-rata yang diterima penduduknya. Semakin tinggi pendapatan tersebut semakin tinggi daya beli penduduk dan daya beli bertambah ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat⁷.

1. Jenis jenis pendapatan

Pada bagian sebelumnya kita dapat memahami pendapatan perkapita, maka disini juga terdapat jenis-jenis dari pendapatan tersebut adapun diantaranya sebagai berikut⁸.

a. Pendapatan Pribadi

Pendapatan pribadi dapat diartikan sebagai semua jenis pendapatan termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan sesuatu kegiatan apapun, yang diterima oleh penduduk suatu negara. Dari arti istilah pendapatan pribadi ini dapat disimpulkan bahwa dalam pendapatan pribadi

⁷*Ibid.*, hal. 11-12.

⁸ *Ibid.*, hal. 47 .

telah termasuk juga pembayaran pindahan. Pembayaran tersebut merupakan pemberian-pemberian yang dilakukan oleh pemerintah kepada berbagai golongan masyarakat dimana para penerimanya tidak perlu memberikan suatu balas jasa atau usaha apapun sebagai imbalan.

b. Pendapatan Disposibel

Apabila pendapatan pribadi dikurangi oleh pajak yang harus dibayar oleh para penerima pendapatan, nilai yang tersisa dinamakan pendapatan disposibel. Dengan demikian pada hakikatnya pendapatan disposibel adalah pendapatan yang dapat digunakan oleh para penerimanya, yaitu semua rumah tangga yang ada dalam perekonomian, untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa yang mereka inginkan.

2. Metode perhitungan pendapatan perkapita

Pendapatan perkapita adalah jumlah pendapatan rata-rata penduduk dalam suatu negara pada periode tertentu. Biasanya dihitung setiap periode satu tahun, untuk mendapatkan jumlah pendapatan rata-rata penduduk, pendapatan nasional dihitung dari jumlah seluruh pendapatan penduduk negara tersebut.

Oleh sebab itu, jumlah penduduk praktis akan mempengaruhi jumlah pendapatan perkapita suatu negara. Pendapatan perkapita dapat juga diartikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada periode tertentu biasanya 1 tahun.

Konsep pendapatan nasional yang biasa dipakai dalam menghitung pendapatan perkapita oleh pemerintah negara-negara pada umumnya adalah Produk Domestik Bruto (PDB/PDRB) atau Produk Nasional Bruto (PNB). Dengan demikian pendapatan perkapita dapat dihitung dengan menggunakan salah satu rumus berikut ini:⁹

$$\text{Pendapatan Perkapita} = \frac{\text{PDB/PDRB}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

⁹Ritonga dkk, *Pelajaran Ekonomi 2*, (Jakarta: Erlangga, 2000), hal. 39.

3. Faktor- faktor yang mempengaruhi pendapatan perkapita

Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan perkapita adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Nasional

Secara sederhana, pendapatan nasional dapat diartikan sebagai jumlah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara pada periode tertentu biasanya satu tahun. Dengan demikian dalam konsep tersebut istilah pendapatan nasional mewakili arti produk domestik bruto atau produk nasional bruto¹⁰.

Beberapa istilah Pendapatan Nasional:

a. Produk Domestik Bruto (PDB)/PDRB

Merupakan nilai barang-barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam periode tertentu biasanya 1 tahun. Didalam suatu perekonomian, barang dan jasa diproduksi bukan saja oleh perusahaan milik penduduk negara tersebut, tetapi oleh penduduk negara lain juga. Selain didapati produk nasional diciptakan oleh faktor-faktor yang berasal dari luar negeri. Dengan demikian PDB merupakan nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi milik negara tersebut dan negara asing¹¹.

Produk Domestik regional Bruto atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto atas harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Sedangkan

¹⁰Wiji Purwanta, *Pengantar Belajar Ekonomi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), hal. 23.

¹¹ M.Ridwan, dkk. *Ekonomi Pengantar Mikro dan Makro Islam*, (Bandung: Citapustaka Media, 2013), hal. 119.

PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk menunjukkan besarnya ukuran perekonomian dan peranan sektor ekonomi¹².

Faktor-faktor yang mempengaruhi PDB/PDRB:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Belanja Daerah
- c. Dana Perimbangan
- d. Tabungan
- e. Tenaga Kerja¹³

b. Produk Nasional Bruto (PNB)

Produk Nasional Netto adalah jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh warga negara dari negara yang pendapatannya nasionalnya dihitung.

c. Net National Produk (NNP)

Net National Produk atau produk nasional bersih adalah PNB dikurangi penyusutan.

2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk merupakan banyaknya individu ataupun masyarakat yang menempati suatu wilayah atau negara pada kurun waktu tertentu.

4. Pandangan Islam Terhadap Pendapatan

Pandangan menurut islam, pendapatan merupakan segala sesuatu yang diperoleh manusia sebagai akibat balas jasa yang diperoleh manusia sebagai akibat balas jasa yang telah diberikan. Dalam islam pemberian balas jasa dari pekerjaan yang dilakukan bersifat halal, tidak termasuk misalnya pendapatan akibat menjual barang-barang haram. Syariat islam menginginkan manusia untuk mencapai dan memelihara kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, manusia diwajibkan untuk memperoleh pendapatan agar kebutuhan-kebutuhan manusia dapat terpenuhi dengan syarat pendapatan

¹² Sussy Susanti, *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Jawa Barat dengan Menggunakan Analisis data Panel*, Jurnal Matematika Inegratif, Vol.9, No.1, April 2003, hal. 5.

¹³ Wiji Purwanta, *Pengantar Belajar Ekonomi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), hal. 25.

yang diperoleh merupakan pendapatan yang bersumber dari pekerjaan yang halal.

Menurut islam, pendapatan perkapita yang tinggi bukan satu-satunya komponen pokok yang menyusun kesejahteraan¹⁴. Ia hanya merupakan *necessary condition* (kondisi yang mencukupi). Maksudnya merupakan suatu kondisi yang tidak dapat diabaikan untuk pencapaian suatu tujuan. Suatu kondisi yang perlu biasanya digunakan sebagai istilah imbalan dari kondisi yang cukup yang dipandang sebagai kekayaan dari suatu kondisi untuk mencapai tujuan. Islam menggunakan parameter *falah*, yaitu kesejahteraan yang haqiqi, kesejahteraan yang sebenar-benarnya dimana komponen-komponen rohaniyah masuk kedalam pengertian *falah* ini.

Selain harus memasukkan unsur *falah* dalam menganalisa kesejahteraan, perhitungan pendapatan nasional dalam islam juga mampu mengenali bagaimana instrument-instrumen waqaf, zakat dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan. Pada intinya, ekonomi islam mengukur kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sistem moral dan sosial islam¹⁵. Maka dapat dijelaskan dalam Qs. Annisa ayat 32.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada allah sebagian dari karunianya sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".

Ayat diatas menjelaskan agar kita tidak iri kepada makhluk Allah yang telah dikaruniakan rezeki lebih banyak dari kita. Karena Allah telah

28. ¹⁴ Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal.

¹⁵ *Ibid*, hal. 228-229.

menetapkan masing-masing kita telah mempunyai rezeki sesuai dengan apa yang diusahakannya. Jadi kita tidak perlu merasa iri jika Allah memberikan orang lain rezeki yang berlebih. Karena setiap rezeki yang kita terima tergantung dari besarnya usaha yang kita lakukan. Oleh sebab itu, mari tingkatkan lagi usaha yang kita kerjakan, agar hasilnya pun tidak mengecewakan kita.

B. Belanja Modal

Sejalan dengan diselenggarakannya otonomi daerah, daerah harus dapat mengembangkan daerahnya sendiri agar apa yang menjadi tujuan diselenggarakannya otonomi daerah dapat terlaksana. Untuk itu diperlukan banyak dana yang harus dikeluarkan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah, yang salah satunya adalah belanja modal. Dengan demikian belanja modal merupakan faktor penting dalam menyelenggarakan pembangunan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah adalah tanggung jawab pemerintah daerah agar pengelolaan keuangan tersebut memenuhi prinsip ekonomi, efisien, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas. Tindakan korupsi, kolusi, suap menyuap dan perbuatan yang merugikan orang lain adalah perbuatan munkar yang harus dicegah dan diberantas. Diantara ayat –ayat alqur’an yang mencegah, melarang perbuatan-perbuatan tersebut salah satunya terdapat dalam Qs. Al-Baqarah ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوهُا إِلَى الْحَاكِمِ لِيَأْكُلُوا مِنْهُ مِمَّا كَرِهْتُمْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ كَمَا كُنْتُمْ

*Artinya : “Janganlah kamu makan harta sesama kamu `dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebahagian harta orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui”*¹⁶.

Belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah serta akan menimbulkan konsekuensi menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Belanja modal memiliki karakteristik spesifik yang menunjukkan adanya berbagai

¹⁶ Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Al-Quran: Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata kunci*, (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2012) hal. 221.

pertimbangan dalam pengalokasiannya. Perolehan aset tetap juga memiliki konsekuensi pada beban operasional dan pemeliharaan pada masa yang akan datang.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja modal diartikan sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset langsung yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi¹⁷. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa: “Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya”.

Sedangkan menurut PSAP Nomor 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang member masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi¹⁸. Selanjutnya pada Pasal 53 Ayat 2 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 ditentukan bahwa nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Kemudian pada Pasal 53 ayat 4 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 disebutkan bahwa kepala daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi sebagai dasar pembebanan belanja modal selain memenuhi batas minimal juga pengeluaran anggaran untuk belanja barang tersebut harus member manfaat lebih dari satu periode akuntansi bersifat tidak rutin. Ketentuan hal ini sejalan dengan PP 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan khususnya PSAP No.7, yang mengatur tentang akuntansi aset tetap. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang

¹⁷Yoyo Sudaryo, *Keuangan Di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), hal. 129

¹⁸ *Ibid*, hal. 130.

memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi asset tetap atau asset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Belanja modal merupakan belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Tersedianya infrastruktur yang baik diharapkan dapat menciptakan efisiensi dan efektifitas di berbagai sektor. Produktifitas masyarakat diharapkan menjadi semakin tinggi dan pada giliran terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan dalam sektor pelayanan akan merangsang masyarakat untuk lebih aktif dan bergairah dalam bekerja karena ditunjang oleh fasilitas yang memadai. Selain itu, investor juga akan tertarik kepada daerah karena fasilitas yang diberikan oleh daerah. Dengan bertambahnya produktifitas masyarakat dan investor yang berada di daerah akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah yang semakin tinggi akan merangsang pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan kepada publik sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi daerah akan meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat.

Peranan belanja modal dalam Desentralisasi Fiskal Optimalisasi penerimaan PAD hendaknya didukung dengan upaya pemda meningkatkan kualitas pelayanan publik. Eksploitasi PAD yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, menjadi disinsentif bagi daerah dan mengancam perekonomian secara makro¹⁹. Tidak efektifnya berbagai perda harus (terkait dengan retribusi dan pajak) selama tahun 2001 bisa jadi menunjukkan tidak adanya relasi positif antara berbagai pungutan baru itu dengan kesungguhan pemda dalam meningkatkan mutu layanan publik. Meskipun mempunyai kewenangan untuk menarik pajak dan retribusi (charge), kewenangan ini perlu dipertimbangkan untung-ruginya (cost and benefit), misalnya dalam penentuan tarif layanan publik. Keengganan masyarakat untuk membayar pajak atau pun retribusi bisa jadi disebabkan kualitas layanan publik yang memprihatinkan. Akibatnya produk yang seharusnya bisa dijual justru direspon negatif. Berbagai belanja yang dialokasi pemerintah,

¹⁹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), hal. 112.

hendaknya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Untuk itu, untuk kepentingan jangka pendek pungutan yang bersifat retribusi lebih relevan dibanding pajak. Alasan yang mendasari yaitu pungutan ini berhubungan secara langsung dengan masyarakat. Masyarakat tidak akan membayar apabila kualitas dan kuantitas layanan publik tidak mengalami peningkatan. Dari 803 perda penerimaan daerah, 90,3% merupakan retribusi. Namun, banyaknya perda ini tidak memberikan tambahan pendapatan daerah yang signifikan. Hal ini menunjukkan indikasi adanya tingkat layanan publik yang masih rendah.

Pergeseran komposisi belanja ini juga digunakan untuk pembangunan fasilitas modal yang dibutuhkan bagi pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan menunjukkan pembangunan sektor industri tertentu (dalam hal ini sektor jasa dan retail) memberikan kontribusi positif terhadap kenaikan pajak²⁰. Menyatakan bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Mereka menemukan adanya korelasi yang kuat antara share (belanja) investasi pada infrastruktur dengan tingkat desentralisasi. Strategi alokasi anggaran pembangunan ini pada gilirannya mampu mendorong dan mempercepat pembangunan ekonomi nasional, sekaligus menjadi alat untuk menurangi disparitas regional. Belanja modal dapat dikategorikan dalam 5 kategori utama, yaitu:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan, pembelian, pembebasan penyelesaian untuk balik nama dan sewa, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

²⁰Majidi N, *Anggaran Pembangunan Dan Ketimpangan Ekonomi Antar Daerah*, (Jakarta: Prisma LP3ES, 1997), hal. 95.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan /penambahan/penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Merupakan pengeluaran/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Merupakan pengeluaran biaya yang digunakan untuk penambahan/ penggantian/ peningkatan/ pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan kedalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan, irigasi serta jaringan. Yang termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah.

C. Pendapatan Asli Daerah

Dasar hukum pendapatan asli daerah terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pengertian pendapatan asli daerah terdapat dalam Pasal 1 UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan²¹. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.²² Menurut Isdijoso dalam Yoyo Sudaryo PAD merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan nonpajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam²³. Sementara itu, menurut Mardiasmo dalam Yoyo Sudaryo PAD adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah²⁴.

Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004, apabila kebutuhan pembiayaan suatu daerah lebih banyak diperoleh dari subsidi atau bantuan dari pusat, dan nyatanya kontribusi PAD terhadap kebutuhan pembiayaan sangat kecil, maka dapat dipastikan bahwa kinerja keuangan daerah itu masih sangat lemah. Kecilnya sebagaimana yang kontribusi PAD kebutuhan pembiayaan tertuang dalam APBD

²¹ Yoyo Sudaryo, *Keuangan Di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2017), hal. 103.

²²*Ibid.*, hal. 104.

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid.*

merupakan bukti kurang mampuan daerah dalam mengelola sumber daya perekonomiannya terutama sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 dan pasal 6 UU No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Pendapatan asli daerah bagi pemerintah daerah sangatlah penting karena PAD menunjukkan kemampuan daerah dalam menggali sumber keuntungannya sendiri yang kemudian menjadi sebuah ukuran kinerja bagi pemerintah daerah dalam proses pengembangan ekonomi daerah. Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kendala utama yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD). Proporsi pendapatan asli daerah yang rendah, dilain pihak menyebabkan pemerintah daerah derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Wujud dari desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digunakan sendiri sesuai dengan potensi daerah . kewenangan daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 ditindak lanjuti dengan peraturan pelaksanaan dalam PP No.65 Tahun 2001 tentang pajak daerah dan PP. No. 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah. Pungutan pajak dan retribusi daerah yang berlebihan dalam

jangka pendek dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, namun dalam jangka panjang dapat menurunkan kegiatan perekonomian, yang pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya pendapatan asli daerah.

Pendapatan asli daerah yang sah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah pemerintah daerah dilarang:

- a. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan
- b. Menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan import/ekspor.

Indikator variabel pendapatan asli daerah ini dapat dihitung dengan rumus:

$$PAD = PPD + PRD + HPKDD + LPS$$

Keterangan:

PAD : Pendapatan Asli Daerah

PPD : Pendapatan Pajak Daerah

PRD : Pendapatan Retribusi Daerah

HPKDD : Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

LPS : Lain-lain PAD yang dipisahkan

1. Jenis-Jenis Pendapatan Asli Daerah

a. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah²⁵. Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan asli daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan kesejahteraan

²⁵Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 52.

masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Kriteria pajak daerah selain yang ditetapkan UU bagi kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- a) Bersifat pajak dan bukan retribusi
- b) Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan
- c) Objek dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum
- d) Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat
- e) Potensinya memadai
- f) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif
- g) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
- h) Menjaga kelestarian lingkungan

Sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 jenis pendapatan pajak untuk pajak provinsi terdiri dari:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dan

peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. Kendaraan diatas air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan di atas air.

- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan. Atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.
- 4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/ atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi, termasuk mata air yang muncul secara ilmiah di atas permukaan tanah. Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut.
- 5) Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

Jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari sebagai berikut:²⁶

²⁶Ahmad Yani. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h.56.

1) Pajak hotel

Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/beristirahat, memperoleh pelayanan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

2) Pajak restoran

Restoran adalah tempat menyantap makanan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.

3) Pajak hiburan

Pajak hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan keramaian dengan nama dan bentuk apa pun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

4) Pajak reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, yaitu benda, alat, pembuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

5) Pajak penerangan jalan

Pajak penerangan jalan merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

6) Pajak pengambilan bahan galian

Pajak pengambilan bahan galian merupakan pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7) Pajak parkir

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

8) Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pengambilan air tanah.

9) Pajak Sarang Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet

10) Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan sebagainya.

11) Pajak Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan adalah pajak atas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

b. Retribusi daerah

Di samping pajak daerah, sumber pendapatan asli daerah yang cukup besar peranannya dalam menyumbang pada terbentuknya pendapatan asli daerah adalah retribusi daerah. Di beberapa daerah pendaptan yg berasal dari retribusi daerah dapat lebih besar dari pada pendapatan dari pajak daerah. Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian

izin tertentu yang khusus disediakan dan/diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan usaha²⁷.

Yang di maksud retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yg khusus di sediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jadi dalam hal retribusi daerah balas jasa dari adanya retribusi daerah tersebut langsung dapat di tunjuk. Misalnya retribusi jalan, karena kendaraan tertentu memang melalui jalan dimana retribusi jalan tersebut di pungut. Juga retribusi pasar di bayar karena ada penggunaan ruangan pasar tertentu oleh si pembayar retribusi itu. Demikian juga retribusi parkir karena ada pemakaian ruangan tertentu oleh si pemakai tempat parkir. Jadi sesungguhnya dalam hal pemungutan iuran retribusi itu dianut asas manfaat (benefit principles). Dalam asas ini besarnya pungutan ditentukan berdasarkan manfaat yg diterima oleh penerima manfaat dari pelayanan yg diberikan oleh pemerintah. Namun yg menjadi persoalan ialah dalam menentukan berapa besar manfaat yg diterima oleh orang yg membayar retribusi tersebut dan menentukan berapa besar pungutan yg harus di bayarnya²⁸. Pada prinsipnya pemungutan retribusi yang harus dibayar oleh si penerima manfaat harus sama dengan nilai dari manfaat yang diterimanya. Tetapi bagaimana menilai manfaat yang diterima oleh pembayar retribusi? Untuk menilai manfaat harus ditempuh melalui beberapa langkah, yaitu:

- a) Pertama diidentifikasi manfaat fisik yang dapat diukur besarnya
- b) Kemudian diterapkan nilai rupiahnya dengan cara menggunakan harga pasar, atau harga barang pengganti, atau

²⁷ Ahmad Yani, *Hubungan Keangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 63.

²⁸ Suparmoko, *Ekonomi Publik*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2012), hal. 85.

dengan mengadakan survey tentang kesediaan membayar (*willing nes to pay*).

Pungutan retribusi daerah yang berkembang selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Retribusi Daerah, yang ternyata menunjukkan beberapa kelemahan diantaranya:

- 1) Hasilnya kurang memadai bila dibandingkan dengan biaya penyediaan jasa oleh pemerintah daerah
- 2) Biaya pemungutannya terlalu tinggi
- 3) Kurang kuatnya prinsip dasar retribusi terutama dalam hal pengenaan, penetapan ,struktur dan besarnya tariff retribusi.
- 4) Asa beberapa jenis retribusi yang pada hakikatnya bersifat sebagai pajak karena pemungutannya tidak dikaitkan langsung dengan balas jasa atau pelayanan pemerintah daerah yang diterima oleh pembayar retribusi
- 5) Ada jenis retribusi perijinan yang tidak efektif dalam kaitannya dengan usaha untuk melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan.

Oleh Karena itu maka pada Tahun 1997 pemerintah merasa perlu untuk mengklarifikasikan berbagai pemungutan retribusi itu atas dasar kriteria tertentu agar memudahkan penerapan prinsip-prinsip dasar pungutan retribusi sehingga mencerminkan hubungan yang jelas antara tarif retribusi dengan pelayanan atau jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Dalam kaitannya dengan usaha menata kembali beberapa sumber pendapatan asli daerah agar lebih memberikan bobot otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah, beberapa jenis retribusi yang pada hakekatnya bersifat pajak diubah statusnya menjadi pajak daerah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah menyadari bahwa pengadministrasian beberapa jenis retribusi

belum dilakukan dengan baik sehingga realisasi penerimaannya masih sangat kecil dan lebih kecil dari yang seharusnya. Dalam Undang-Undang yang baru itu diusahakan agar ada peningkatan efisiensi dan efektifitas pemungutan retribusi dalam rangka usaha peningkatan pendapatan asli daerah. Undang-Undang baru itu dimaksudkan pula untuk menyederhanakan dan memperbaiki sistem retribusi daerah dengan mengklasifikasikan jenis retribusi daerah dan menyederhanakan tarif retribusinya²⁹.

Banyak jenis retribusi tetapi dikelompokkan menjadi 3 macam sesuai dengan objeknya. Objek retribusi adalah berbagai jenis pelayanan atau jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun tidak semua jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya. Jasa pelayanan yang dapat dipungut retribusinya hanyalah jenis-jenis jasa pelayanan yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak untuk dijadikan objek retribusi. Jasa-jasa pelayanan tersebut diantaranya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a) Retribusi yang dikenakan pada jasa umum

Adapun yang termasuk dalam jasa pelayanan umum antara lain:

- ✓ Pelayanan kesehatan
- ✓ Pelayanan kebersihan dan persampahan
- ✓ Penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk
- ✓ Pelayanan pemakaman
- ✓ Pelayanan parkir di tepi jalan umum
- ✓ Pelayanan pasar
- ✓ Pelayanan air bersih
- ✓ Pengujian kendaraan bermotor
- ✓ Pemeriksaan alat pemadam kebakaran

²⁹ Suparmoko, *Ekonomi Publik*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2012), hal. 87.

- ✓ Penggantian biaya cetak peta yang dibuat pemerintah daerah

- ✓ Pengujian kapal perikanan

b) Retribusi yang dikenakan pada jasa usaha

Adapun yang termasuk dalam retribusi yang dikenakan pada jasa usaha antara lain:

- ✓ Pemakaian kekayaan daerah

- ✓ Pasar grosir dan atau pertokoan

- ✓ Pelayanan terminal

- ✓ Pelayanan tempat khusus parkir

- ✓ Pelayanan tempat penitipan anak

- ✓ Penginapan/vila

- ✓ Penyedotan WC

- ✓ Rumah potong hewan

- ✓ Tempat pendaratan kapal

- ✓ Tempat rekreasi dan olah raga

- ✓ Penyeberangan diatas air

- ✓ Pengolahan air limbah

- ✓ Penjualan usaha produksi daerah

c) Retribusi yang dikenakan pada perijinan tertentu

Perijinan yang dapat dipungut retribusinya antara lain adalah:

- ✓ Ijin peruntukan penggunaan tanah

- ✓ Ijin mendirikan bangunan (IMB)

- ✓ Ijin tempat penjualan minuman beralkohol

- ✓ Ijin gangguan

- ✓ Ijin trayek

- ✓ Ijin pengambilan hasil hutan

c. Hasil Pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan

kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

1. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD.
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/ BUMD.
3. Bagian laba penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik Pemda. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

- 1) Hasil penjualan asset daerah yang dipisahkan.
- 2) Jasa giro.
- 3) Pendapatan bunga.
- 4) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
- 5) Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan pengadaan barang, dan jasa oleh daerah.
- 6) Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- 8) Pendapatan denda pajak.
- 9) Pendapatan denda retribusi.
- 10) Pendapatan eksekusi atas jaminan.
- 11) Pendapatan dari pengembalian.
- 12) Fasilitas sosial dan umum.
- 13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
- 14) Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

D. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari otoritas pemerintah di atasnya. Sebelum munculnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, kelompok pendapatan ini terbatas hanya pada dana perimbangan. Setelah peraturan ini muncul, terdapat transfer dana lain diluar dana perimbangan³⁰.

1. Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Daerah dan Pusat mencakup pembagian kewenangan secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah³¹.

Agar pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dapat terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan pusat yang dikonsentrasikan kepada gubernur maupun ditugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau desa atau sebutan lainnya dalam rangka tugas pembantuan.

a. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase³².

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana Bagi Hasil (DBH) sumber daya alam terdiri dari:

- a. Kehutanan,
- b. Pertambangan umum

³⁰ Abdul Halim. *Akuntansi Keuangan Daerah*. (Jakarta: Salemba Empat, 2018), hal. 99.

³¹ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

³² Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti. *Akuntansi Sektor Publik*. (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hal. 26.

- c. Perikanan
- d. Pertambangan minyak bumi,
- e. Pertambangan gas bumi
- f. Pertambangan panas bumi

Pengaturan Dana Bagi hasil mempertegas bahwa sumber pembagian berasal dari APBN berdasarkan angka persentase tertentu dengan lebih memperhatikan potensi daerah penghasil. Jenis pendapatan dalam APBN yang dibagihasilkan melalui potensi pajak dan potensi sumber daya alam yang dikelola oleh pusat.

Pendapatan APBN yang dibagihasilkan dengan daerah meliputi:

1) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak yang berupa bumi dan/atau bangunan. Dilihat dari pemungutannya, awalnya PBB termasuk pajak pusat. Namun, setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengalihkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan menjadi jenis pajak daerah.

2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB merupakan pungutan pemerintah kepada masyarakat yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan, imbalan yang diberikan kepada negara masyarakat pembayar BPHTB adalah pengakuan hak atas tanah dan bangunan yang diperolehnya. Besarnya bagian pemerintah daerah dari BPHTB ini adalah 80% dengan rincian 16% untuk provinsi dan 64% untuk kabupaten/kota.

3) Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21

Terhadap penerimaan pajak ini, pemerintah daerah mendapatkan bagian sebesar 20%. Bagian pemerintah daerah tersebut selanjutnya dibagi dengan imbalan 60% untuk kabupaten/kota dan 40% untuk provinsi. Pembagian dana bagi hasil PPh ini dilakukan setiap triwulan.

4) Dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam

Penerimaan ini meliputi penerimaan dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah pendapatan APBD yang diperoleh dari alokasi APBN yang ditujukan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah³³.

Alokasi DAU merupakan pelaksanaan asas desentralisasi dalam otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, total nilai DAU secara keseluruhan minimal 26% dari pendapatan dalam negeri bersih di APBN. Yang dengan pendapatan dalam negeri bersih APBN adalah penerimaan pendapatan (pajak dan bukan pajak) dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagikan kepada pemerintah daerah. Ketentuan tersebut secara tidak langsung akan memaksa pemerintah untuk meratakan dana anggaran kepada daerah sehingga pelaksanaan pembangunan juga lebih merata.

Perhitungan alokasi DAU kepada suatu daerah didasarkan pada celah fiskal, yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal need*) daerah dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah. Kebutuhan fiskal daerah adalah kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Layanan dasar umum yang dimaksudkan disini meliputi:

- a. Layanan kesehatan,
- b. Layanan pendidikan,
- c. Penyediaan infrastruktur, dan
- d. Pengentasan kemiskinan,

³³ Damas Dwi Anggoro. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (Malang:UB Press, 2017), hal.24.

Total belanja keempat layanan itulah yang merupakan nilai dari kebutuhan fiskal daerah. Namun, untuk keperluan penghitungan DAU tersebut diukur berdasarkan:

- a. Jumlah penduduk,
- b. Luas wilayah,
- c. Indeks kemahalan konstruksi,
- d. Produk domestik bruto regional per kapita, dan
- e. Indeks pembangunan manusia

c. Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari APBN yang dimaksudkan untuk membantu kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang menjadi urusan daerah dan sesuai prioritas nasional³⁴.

DAK utamanya ditujukan untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Contoh dari DAK adalah untuk kesehatan dan pendidikan. Suatu daerah yang tingkat kesehatan dan pendidikannya masih kurang bisa mendapatkan DAK dari APBN guna meningkatkan layanan pemerintah daerah dibidang kesehatan dan pendidikan. Kedua urusan tersebut telah menjadi urusan pemerintah daerah, namun menjadi prioritas nasional sehingga APBN memberikan tambahan dana berupa DAK kesehatan dan DAK pendidikan.

Besarnya nilai DAK untuk suatu daerah ditetapkan setiap tahun sesuai dengan ketersediaan dana dalam APBN. Karena sifatnya yang khusus, DAK tidak diberikan kepada semua daerah, tetapi hanya diberikan kepada daerah tertentu. Dalam menentukan daerah yang berhak mendapatkan DAK, Pemerintah menetapkannya atas dasar kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum

³⁴Damas Dwi Anggoro. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (Malang:UB Press, 2017), hal.28.

ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dalam APBD. Kriteria khusus ditetapkan dengan memerhatikan peraturan perundangan dan karakteristik daerah. Sedangkan kriteria teknis akan ditetapkan oleh kementerian negara/departemen teknis terkait.

DAK sepenuhnya digunakan untuk belanja modal untuk peningkatan fasilitas public dengan kata lain tidak ada bagian DAK yang digunakan untuk biaya operasional pembangunan seperti biaya perjalanan dinas dan sebagainya.³⁵

Walaupun demikian, untuk daerah dengan kemampuan keuangan tertentu (daerah yang selisih antara penerimaan umum APBD dan belanja pegawainya sama dengan nol atau negati) tidak diwajibkan untuk menyediakan dana pendamping.

2. Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

1. Dana Otonomi Khusus

Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah.

Dana Otonomi Khusus terdiri dari:

- a. Dana Otonomi Khusus Papua
- b. Dana Otonomi Khusus Papua Barat
- c. Dana Otonomi Khusus Aceh
- d. Dana Tambahan Infrastruktur Papua
- e. Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat
- f. Dana Otonomi Khusus Yogyakarta

2. Dana Penyesuaian

Dana penyesuaian adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk mendukung program atau kebijakan tertentu pemerintah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan kegiatannya sudah menjadi urusan daerah.

³⁵Riva Ubar Harahap, *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara*, (Jurnal Kitabah, Vol. 1 1 Januari-Juni 2017), hal. 120.

Dana penyesuaian terdiri dari:

- a. Dana peningkatan kualitas pendidikan
- b. Tunjangan profesi guru PNS Daerah
- c. Bantuan Operasional Sekolah

3. Transfer Pemerintah Provinsi

1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak
2. Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

E. Hubungan Variabel

1. Hubungan antara Belanja Modal dengan Pendapatan Perkapita

Pembangunan sara dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pelayanan sektor publik secara berkelanjutan akan meningkatkan sarana dan prasarana publik, investasi pemerintah juga meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan dan sarana penunjang lainnya. Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal pembangunan yang seimbang dengan peningkatan PDB/PDRB. Pembentukan modal tersebut harus didefinisikan secara luas sehingga mencakup semua pengeluaran yang sifatnya menaikkan produktivitas³⁶. Dengan ditambahkan infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan, seiring dengan meningkatnya pendapatan masyarakat. Jika pemda menetapkan anggaran belanja pembangunan lebih besar dari pengeluaran rutin, maka kebijakan ekspansi anggaran daerah ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi belanja modal untuk pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian akan mendorong tingkat produktivitas penduduk. Pada gilirannya hal ini dapat meningkatkan

³⁶Saragih Juli Panglima, *Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003), hal. 47.

pendapatan masyarakat secara umum yang tercermin dalam pendapatan perkapita.

2. Hubungan antara Pendapatan Asli daerah dan Pendapatan Perkapita

Tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah³⁷. Daerah yang memiliki tingkat penerimaan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki tingkat pendapatan perkapita yang lebih baik. PAD merupakan sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu. Oleh karena itu, daerah tidak akan berhasil bila daerah tidak mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti meskipun terjadi peningkatan penerimaan PAD. Bila yang terjadi sebaliknya maka bisa diindikasikan adanya eksploitasi PAD terhadap masyarakat secara berlebihan tanpa memperhatikan peningkatan produktifitas masyarakat itu sendiri. Menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan PAD hendaknya tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, tetapi juga diukur dengan perannya untuk mengatur perekonomian masyarakat agar dapat lebih berkembang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

3. Hubungan antara Pendapatan Transfer dan Pendapatan Perkapita

Pendapatan Transfer merupakan sisi penerimaan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dimana penerimaan akan terhimpun menjadi modal. Selanjutnya melalui modal tersebut maka daerah akan melakukannya untuk belanja pembangunan sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan Pendapatan Perkapita masyarakat juga akan semakin meningkat.

³⁷Brata Dan Aloysius Gunadi, *Komposisi Penerimaan Sektor Publik Dan Pertumbuhan Ekonomi Regional*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya, 2004) hal. 21.

F. Kajian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

NO	Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	Widya Jayanti (2013)	Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Perkapita (Studi pada pemerintah Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2011)	<ul style="list-style-type: none"> a. Belanja Modal b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) c. Pendapatan Perkapita 	<ul style="list-style-type: none"> a. Belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan perkapita. b. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan perkapita. c. Belanja modal dan pendapatan asli daerah bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan perkapita.
2	Fiona Puspita Devi Purwanto (2013)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal (Studi kasus pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pertumbuhan Ekonomi b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) c. Dana Alokasi Umum (DAU) d. Belanja Modal 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap belanja modal b. Pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal c. Dana alokasi umum berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap belanja modal d. Pertumbuhan ekonomi,

		2008-2011)		pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.
3	Sabar Siregar (2016)	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal terhadap Pendapatan Perkapita Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat.	<ul style="list-style-type: none"> a. Dana Alokasi Umum (DAU) b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) c. Belanja Modal d. Pendapatan Perkapita 	<ul style="list-style-type: none"> a. Secara simultan dana alokasi umum, pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap pendapatan perkapita b. Secara parsial dana alokasi umum dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan perkapita c. Secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap pendapatan perkapita.
4	Rijalul Ahmad Fikri (2017)	Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> a. Belanja Modal b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) c. Pertumbuhan Ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Secara simultan terdapat pengaruh tapi sangat lemah antara belanja modal dan pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi b. Belanja modal secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap

				<p>pertumbuhan ekonomi</p> <p>c. Pendapatan asli daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi</p>
5	Hasbi Aulia Siregar (2017)	Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Perkapita Di Pemkab/Pe mko Provinsi Sumatera Utara (2011-2015)	<p>a. Belanja Modal</p> <p>b. Pendapatan Asli Daerah (PAD)</p> <p>c. Dana Perimbangan</p> <p>d. Pendapatan Perkapita</p>	<p>a. Secara simultan belanja modal, pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan perkapita</p> <p>b. Secara parsial belanja modal tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap pendapatan perkapita</p> <p>c. Secara parsial pendapatan asli daerah berpengaruh dan signifikan terhadap pendapatan perkapita</p> <p>d. Secara parsial dana perimbangan tidak berpengaruh dan signifikan terhadap pendapatan perkapita.</p>

Persamaan penelitian saya dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama memakai variabel Belanja Modal (X1) dan Pendapatan Asli Daerah (X2) kemudian sama-sama memakai variabel Y yaitu Pendapatan Perkapita. Sedangkan perbedaannya adalah peneliti terdahulu memakai variabel Dana Perimbangan

sebagai variabel X3 sedangkan pada penelitian saya menggunakan Pendapatan Transfer sebagai variabel X3. Pada peneliti terdahulu meneliti di Pemkab/Pemko Provinsi Sumatera Utara tahun 2001-2015, sedangkan pada penelitian saya di Kota Medan tahun 2013-2017.

Sumber :

1. Widya Jayanti (2013) Universitas Muhammadiyah Surakarta
2. Fiona Puspita Devi Purwanto (2013) Universitas Negeri Yogyakarta
3. Sabar Siregar (2016) Universitas Sumatera Utara Medan
4. Rijalul Ahmad Fikri (2017) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
5. Hasbi Aulia Siregar (2017) Universitas Sumatera Utara Medan

G. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka penalaran yang terdiri dari konsep-konsep atau teori yang menjadi acuan penelitian. Adapun kerangka teoritis terdiri dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

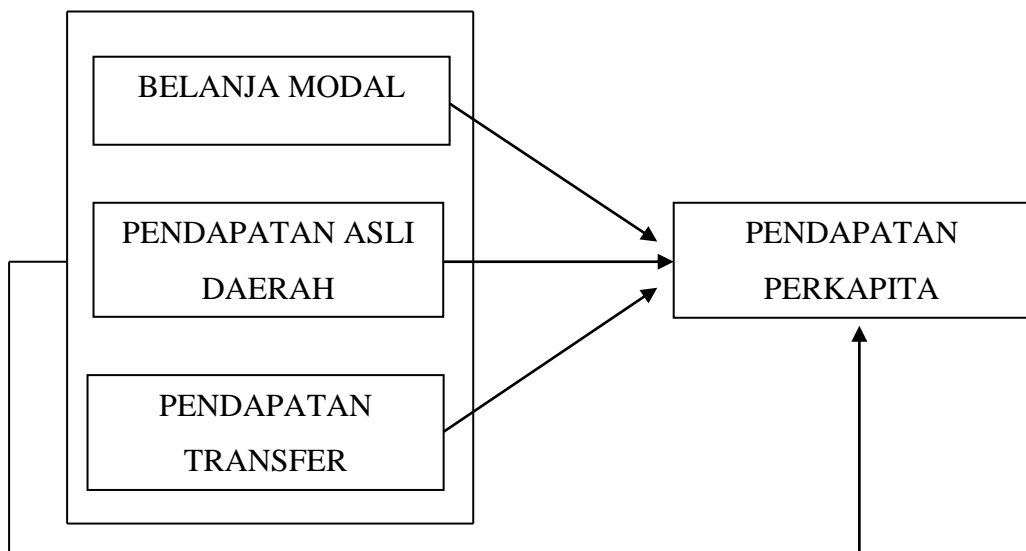
1. Pertambahan belanja modal yang semakin meningkat dan baiknya infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Jika pemerintah daerah menetapkan anggaran belanja modal atau pembangunan lebih besar dari pengeluaran rutin, maka kebijakan ekspansi anggaran daerah ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan berkembangnya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah juga meningkatkan pendapatan rata-rata masyarakat disuatu daerah.
2. Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan PAD secara berkelanjutan akan menyebabkan peningkatan

pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi juga akan meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat disuatu daerah.

3. Pendapatan Transfer merupakan sisi penerimaan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dimana penerimaan akan terhimpun menjadi modal. Selanjutnya melalui modal tersebut maka daerah akan melakukannya untuk belanja pembangunan sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat.

Gambar 2.1

Kerangka Teoritis



H. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang diajukan. Hipotesis merupakan pernyataan sementara berupa dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Hipotesis merupakan kebenaran sementara yang masih diuji. Oleh karena itu, hipotesis berfungsi sebagai cara untuk menguji kebenaran³⁸. Maka hipotesis penelitian sebagai berikut:

³⁸Suryani, *Metode Riset Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Pada Peneliiian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2015), hal. 98.

1. H_a : Belanja modal berpengaruh terhadap pendapatan perkapita di Kota Medan.
 H_o : Belanja modal tidak berpengaruh terhadap pendapatan perkapita di Kota Medan.
2. H_a : Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap pendapatan perkapita di Kota Medan.
 H_o : Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap pendapatan perkapita di Kota Medan.
3. H_a : Pendapatan Transfer berpengaruh terhadap pendapatan perkapita di Kota Medan.
 H_o : Pendapatan Transfer tidak berpengaruh terhadap pendapatan perkapita di Kota Medan.
4. H_a : Secara simultan belanja modal, pendapatan asli daerah dan Pendapatan Transfer berpengaruh terhadap pendapatan perkapita di Kota Medan.
 H_o : Secara simultan belanja modal, pendapatan asli daerah dan Pendapatan Transfer tidak berpengaruh terhadap pendapatan perkapita di Kota Medan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang lebih fokus pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistik. Pendekatan kuantitatif disebut juga pendekatan tradisional, positivisme, eksperimental dan empiris adalah penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori dan atau hipotesis-hipotesis melalui variable-variabel penelitian dalam angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik atau pemodelan matematis

³⁹.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian untuk menggambarkan dengan lebih teliti ciri-ciri usaha untuk menentukan frekuensi terjadinya sesuatu atau hubungan sesuatu yang lain.

Selain itu peneliti juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku maupun laporan hasil penelitian terdahulu⁴⁰.

B. Lokasi Penelitian

Guna mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis melaksanakan penelitian di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan yang berlokasi di Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan.

C. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Desember 2018 sampai dengan Mei 2019 yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

³⁹Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: Gramedia, 2007), hal. 30.

⁴⁰ Iqbal Hasan, *Analisis Data Dengan Statistik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 5.

Tabel 3.1
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul			■	■																												
2	Penulisan Proposal					■	■	■	■																								
3	Bimbingan Proposal									■	■	■	■																				
4	Diterima Proposal												■																				
5	Seminar Proposal														■																		
6	Riset																					■	■	■	■								
7	Pengolahan Data																													■	■	■	■
8	Sidang																																■

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan subjek penelitian. Penelitian populasi hanya dapat dilakukan bagi populasi terhingga dan subyeknya tidak terlalu banyak. Objek pada populasi diteliti, hasilnya dianalisis, disimpulkan dan kesimpulan itu berlaku untuk seluruh populasi

⁴¹. Populasi yang menjadi objek penelitian ini adalah seluruh data laporan Realisasi Anggaran Kota Medan tahun 2013-2017

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Adapun cara pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh yaitu teknik

⁴¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Publik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal. 173.

penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel⁴². Adapun sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah data laporan Realisasi Anggaran tahun 2013-2017.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi⁴³.

2. Sumber Data

Data sekunder bisa diperoleh dari instansi-instansi, perpustakaan maupun dari pihak lain⁴⁴. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data sekunder dari dokumen-dokumen yang ada di BPKAD kota medan untuk memperoleh data Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Belanja Modal di Kota medan. Sedangkan data Pendapatan Perkapita penulis memperoleh dari situs web BPS Kota Medan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan lain-lain seperti buku-buku dan sebagainya. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari BPKAD Kota Medan Tahun 2013-2017. Penulis menggunakan aplikasi Eviews 10 dalam pengolahan data.

⁴²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Cet. Ke 8*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 62.

⁴³Suryani, *Metode Riset Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pt. Fajar Interpretama Mandiri, 2006), hal. 57.

⁴⁴Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hal. 57.

G. Definisi Operasional

Operasional variabel adalah penjelasan mengenai cara-cara tertentu yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur (mengoperasionalkan) *construct* menjadi variable penelitian yang dapat dituju. Sehingga memungkinkan peneliti yang lain untuk melakukan replikasi (pengulangan) pengukuran dengan cara yang sama, atau mencoba mengembangkan cara pengukuran *construct* yang lebih baik.

1. Variabel Independen

Variabel independen sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel stimulus atau variabel yang mempengaruhi variabel lain, biasanya dinotasikan dengan symbol (X)⁴⁵.

a. Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, belanja modal diartikan sebagai pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset langsung yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi⁴⁶

b. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan leluasa kepada daerah dalam menggali pendanaan pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi⁴⁷.

⁴⁵Suryani, *Metode Riset Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pt. Fajar Interpretama Mandiri, 2006), hal. 90.

⁴⁶ Yoyo Sudaryo, *Keuangan Di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017), hal. 129

⁴⁷Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal. 51-51.

c. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan.

2. Variabel Dependen

Variabel dependen sering disebut variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini adalah Pendapatan Perkapita (Y).

a. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita menurut Sadono Sukirno adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan perkapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara pada satu tahun tertentu dengan jumlah penduduk negara pada tahun tersebut⁴⁸.

Pendapatan perkapita dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pendapatan Perkapita} = \frac{\text{PDB/PDRB}}{\text{Jumlah Penduduk}}$$

H. Teknik Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Pendapatan Perkapita.

⁴⁸ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Modern, Edisi Pertama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 11-12.

2. Uji Asumsi Klasik

Alat uji yang digunakan adalah uji asumsi klasik yaitu untuk mengetahui apakah terdapat masalah didalam data regresi. Uji asumsi klasik yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y), maka peneliti menggunakan analisis regresi untuk membandingkan dua variabel atau lebih yang berbeda.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal. Normalitas dapat dilihat dengan menggunakan uji normal *Kolmogorov Smirnov*⁴⁹.

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah kondisi adanya hubungan linear antar variabel independen. Karena melibatkan beberapa variabel independen, maka multikolinearitas tidak akan terjadi pada persamaan regresi sederhana (yang terdiri atas satu variabel dependen dan satu variabel independen)⁵⁰. Multikolinearitas merupakan kondisi dimana dua atau lebih variabel bebas saling berkorelasi. Estimasi parameter dalam model regresi menjadi biasa ketika kondisi ini terjadi, selain sesatan bakunya menjadi besar, koefisien regresinya juga relative kurang presisi. Munculnya multikolinearitas dapat diindikasikan dari nilai VIF (Variance Inflation Factor), yang merupakan simpangan baku kuadrat dan digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antar variabel bebas. Nilai VIF melebihi 10 menunjukkan adanya gejala multikolinearitas⁵¹.

⁴⁹ V Wiranta Sujarweni, *SPSS Untuk Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Pers, 2015), hal. 52.

⁵⁰ Winarno dan Wing Wahyu, *Analisis Ekonomika Dan Statistik Dengan Eviews*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011), hal. 59.

⁵¹ Getut Pramesti, *Statistika Lengkap Secara Teori Dan Aplikasi Dengan SPSS 23*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2016), hal. 68.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan *variance* residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar *Scatter plot*, regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas jika :

- a) Titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau di sekitar angka 0.
- b) Titik-titik data tidak mngumpul hanya diatas atau dibawah saja.
- c) Penyebaran titik-titik dan tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
- d) Penyebaran titik-titik data tidak berpola.

Jika hasil output *Scatter polt* demikian, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorekasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linier terdapat hubungan, baik positif maupun negative antar data yang ada pada variable-variabel penelitian. Deteksi gejala autokorelasi digunakan nilai *Durbin Watson* (DW) dengan membandingkan antara uji I *Durbin Watson* dengan nilai table.

Penarikan kesimpulan ada atau tidaknya gejala autokorelasi berdasarkan:

1. Lebih besar dari nol berarti ada autokorelasi positif.
2. Apabila DW hitung lebih besar dari $(4-dl)$ maka koefisien autokorelasi lebih kecil dari nol, berarti ada autokorelasi negative.
3. Apabila DW hitung terletak antara batas atas (du) dan $(4-du)$ maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti terbebas dari autokorelasi.
4. Apabila DW hitung lebih rendah dari batas bawah (dl) atau terletak antara batas atas $(4-du)$ dan $(4-dl)$ maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

3. Analisis Regresi

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui ketergantungan variable dependen (terikat) dengan satu atau lebih variable independen (variable bebas) dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variable dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variable dependen dengan satu persamaan.

Adapun persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y=a+b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3$$

Keterangan

Y = Pendapatan Perkapita sebagai variable dependen

a = Nilai Konstan

b = Koefisien Regresi, yaitu nilai peningkatan/penurunan variable Y

X1 = Belanja Modal sebagai variable independen

X2 = Pendapatan Asli Daerah sebagai variable independen

X3 = Pendapatan Transfer sebagai variabel independen

4. Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada dasarnya untuk mengukur besarnya kontribusi atau pengaruh variable bebas terhadap variasi naik turunnya variable terikat. Nilai koefisien determinasi berada antara 0 sampai 1. Dengan kata lain, koefisien determinasi merupakan kemampuan variable X dalam menjelaskan variable Y.

b. Uji F (Uji Simultan)

Uji F atau dikenal dengan uji simultan adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji F adalah:

- a) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai $Sig. F < \alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel-variabel dependen.
- b) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan nilai $Sig. F > \alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel-variabel dependen.

c. Uji Signifikan Parametrik Individual (Uji t)

Uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variable penjelas/dependen secara individual dalam menerangkan variabel independen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan secara 0,05 ($\alpha=5\%$). Ketentuan penolakan atau penerimaan hipotesis adalah sebagai berikut:⁵²

- a) Jika nilai signifikan $t > 0,05$ maka H_0 diterima dan menolak H_a (koefisien regresi tidak signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variable dependen.
- b) Jika nilai signifikan $t < 0,05$ maka H_0 ditolak dan menerima H_a (koefisien regresi signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Dalam pengujian hipotesis ini, bila nilai t_{hitung} berada pada daerah penerimaan H_0 atau terletak diantara nilai tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Dengan demikian, bila nilai t_{hitung} lebih kecil atau sama dengan dari nilai tabel, maka H_0 diterima. Nilai t_{hitung} adalah nilai mutlak, sehingga tidak melihat positif atau negatif lainnya.

⁵² Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*, (Semarang: Penerbit UNDIP, 2016), hal. 98.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Instansi

1. Sejarah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan

Kantor walikota Medan dibangun pada 1908, kemudian dipugar dengan menambah pada 1913. Akan tetapi, bangunan ini secara resmi digunakan pada 1918 pada saat Gemeenteraa dan memilih Baron Daniel Mackey sebagai Walikota Medan yang pertama. Sebelum Jepang datang, terdapat tempat sosok Walikota Medan yang berkantor di Balai Kota, yakni Baron Daniel Mackey (1918-1931), JM Wesselink (1931-1934), G Pitlo (1934-1942).

Semasa era pendudukan Jepang 1942, kantor ini tetap digunakan sebagai Kantor Walikota Medan, yakni Hayasaki. Sejalan dengan kemerdekaan Indonesia pada 1945, maka Balai Kota ini menjadi Kantor Walikota Medan pribumi yang pertama yakni Luat Siregar. M. Jusuf, Djaidin Purba, AM Jalaludin, Musa Siregar, Madja purba, PR Telaumbanua, Aminurasjid, Sjoekani, MS Arifin dan Agus Salim Rangkuti.

Dahulu Badan Pengelolaan Daerah masih berupa unit kerja yang kecil yaitu bagian secretariat daerah Kota Medan yang tugas pokoknya mengelola keuangan pemerintahan Kota Medan. Dimana pada saat itu tugas pengelolaan keuangan pemerintahan Kota Medan belum begitu lengkap yang terdiri dari 5 sub bagian yaitu Anggaran, Perbendaharaan, Gaji dan Pembukuan.

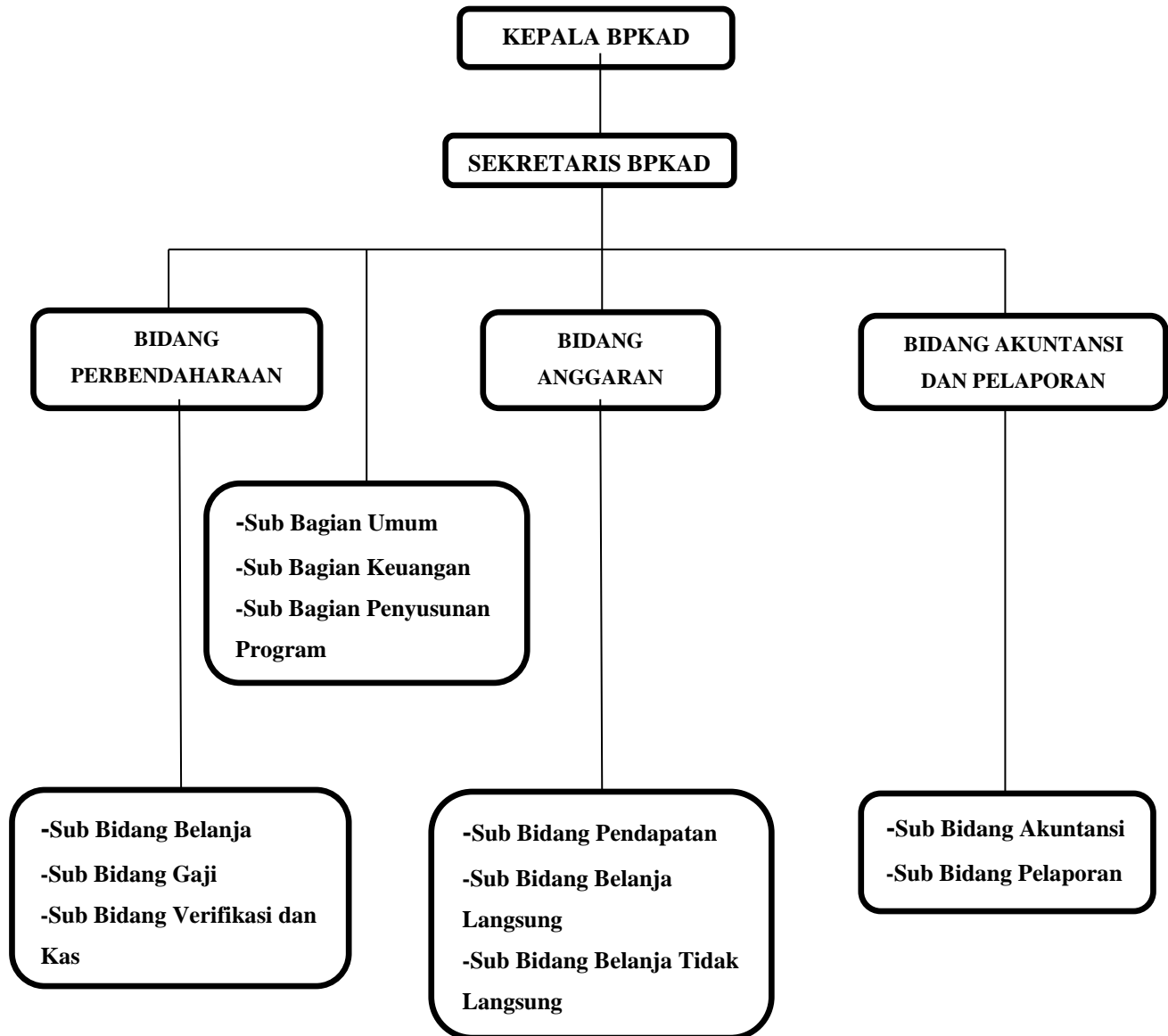
Seiring perkembangan dan laju pertumbuhan penduduk Kota Medan, maka melalui peraturan daerah Kota Medan bagian diatas ditingkatkan menjadi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) yang tugas utamanya mengelola keuangan pemerintah Kota Medan. Yang sekarang ini terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat, Bidang Anggaran, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Medan sebagai konteks pelayanan publik dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good government*). Pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan penataan organisasi perangkat daerah yang professional dan berkualitas dalam sistem dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai sarana perkembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan berkeinginan agar setiap Aparatur Pemerintahan Kota Medan berkemampuan melaksanakan tugasnya dengan baik, berdayaguna efisien sehingga dapat terwujud pelayanan Pemerintah Kota Medan yang prima sesuai dengan sistem, Standart Operasional dan Prosedur (SOP) dan prosedur keuangan yang ada.

Kantor Pemerintahan Kota Medan khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) beralamatkan Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan, Kode Pos 20112. Hal yang melatar belakangi penulis untuk melaksanakan praktek kerja magang di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan adalah ingin mengetahui bagaimana keadaan atau kondisi lingkungan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan secara jelas, selain itu penulis juga ingin melihat sistem kerja yang diharapkan oleh kantor tersebut dalam penyusunan laporan keuangan daerah.

2. Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan

Gambar 4.1
Struktur Organisasi BPKAD Kota Medan



3. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

1) Kepala BPKAD

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah dibidang pengelolaan keuangan daerah lingkup anggaran, perbendaharaan dan pelaporan.

Kepala BPKAD menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan daerah.
- b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan.
- d. Penyusunan dan penyelenggaraan administrasi keuangan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelola keuangan daerah.
- e. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan keuangan daerah.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan administrasi umum, keuangan dan penyusunan program.

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan sekretariat.
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program BPKAD.
- c. Pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan BPKAD yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan BPKAD.
- d. Pengelolaan dan pemberdayaan sumberdaya manusia, pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan.
- e. Pelaksanaa koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas BPKAD.
- f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian bidang kesekretariatan.
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh BPKAD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum

Sub bagian umum dipimpin oleh Kepala Sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Sub bagian umum mempunyai tugas pokok pelaksanaa sebagian tugas sekretaris lingkup administrasi umum.

Sub bagian umum mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana, program dan kegiatan Sub Bagian Umum.
- 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum.
- 3) Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan tata naskah dinas, penataan kearsipan, perlengkapan, penyelenggaraan kerumahtanggaan dan keprotokolan BPKAD.
- 4) Pengelolaan administrasi kepegawaian.

- 5) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasandan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian.
- 6) Pelaksanaan hubungan masyarakat.
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Keuangan

Sub bagian keuangan dipimpin oleh Kepala Sub bagian, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup pengelolaan administrasi keuangan.

Sub bagian keuangan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana, program dan kegiatan sub bagian keuangan.
- 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan.
- 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan dan verifikasi.
- 4) Penyiapan bahan/pelaksanaan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan.
- 5) Penyusunan laporan keuangan BPKAD.
- 6) Pelaksanaan tugas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- 7) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- 8) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

c. Sub Bagian Penyusunan Program

Sub bagian penyusunan program dipimpin oleh Kepala sub bagian, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris. Sub bagian penyusunan program mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian tugas sekretariat lingkup penyusunan program dan pelaporan.

Sub bagian penyusunan program mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana, program dan kegiatan sub bagian penyusunan program.
- 2) Pengumpulan bahan petunjuk teknis lingkup penyusunan rencana, program dan kegiatan BPKAD.
- 3) Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program BPKAD.
- 4) Penyusunan bahan evaluasi pelaporan kinerja kegiatan BPKAD.
- 5) Penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- 6) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Anggaran

Bidang anggaran dipimpin oleh kepala bidang, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan. Bidang anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKAD lingkup pendapatan, belanja tidak langsung dan belanja langsung.

Bidang anggaran mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang anggaran.
- b. Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup anggaran yang meliputi pendapatan, pembiayaan, belanja tidak langsung dan belanja langsung.
- c. Pengkoordinasian Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD).

- d. Pengkoordinasian dan penyusunan Rancangan APBD dan Perubahan APBD atas usulan SKPD.
- e. Pengkoordinasian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Bidang anggaran terdiri dari:

- a. Sub Bagian Pendapatan

Sub bagian pendapatan mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang pendapatan dan penerimaan pembiayaan.
- 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pendapatan dan penerimaan pembiayaan.
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan dan pengendalian kegiatan penyusunan rencana dan program pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.
- 4) Pengkoordinasian Rencana Keuangan Anggaran (RKA) pendapatan SKPD.
- 5) Penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan.
- 6) Penyiapan bahan pengesahan DPA/DPPA pendapatan dan pembiayaan SKPD.
- 7) Penyiapan bahan SPD pendapatan dan pembiayaan sesuai DPA/DPPA SKPD.

- b. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung

Sub bidang belanja tidak langsung dipimpin oleh kepala sub bidang, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang anggaran. Sub bidang belanja tidak langsung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang anggaran lingkup belanja tidak langsung.

Sub bisang belanja tidak langsung mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang belanja tidak langsung.

- 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup belanja tidak langsung.
- 3) Pengkoordinasian perencanaan dan penyusunan anggaran belanja tidak langsung dengan SKPD.

c. Sub Bidang Belanja Langsung

Sub bidang belanja langsung dipimpin oleh kepala sub bidang, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang anggaran. Sub bidang belanja langsung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas bidang anggaran lingkup belanja langsung.

Sub bisang belanja langsung mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang belanja langsung.
- 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup belanja langsung.
- 3) Pengkoordinasian Rencana Keuangan Anggaran (RKA) belanja langsung SKPD.

4) Bidang Perbendaharaan

Bidang perbendaharaan dipimpin oleh kepala bidang, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang. Bidang perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKAD lingkup gaji, belanja, verifikasi dan kas.

Bidang perbendaharaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang perbendaharaan.
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup perbendaharaan.
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang gaji, belanja, verifikasi dan kas.
- d. Penyiapan Surat Pencairan Dana (SP2D) belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.

- e. Pengujian terhadap pengajuan pembayaran gaji, belanja, verifikasi dan kas.
- f. Penyiapan beban pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

Bidang perbendaharaan terdiri dari:

a. Sub Bidang Gaji

Sub bidang gaji mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang gaji.
- 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup gaji pegawai.
- 3) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang gaji.
- 4) Pemeriksaan kelengkapan berkas pengajuan SPM gaji dari SKPD.
- 5) Penyiapan bahan pembuatan dan penyusunan daftar gaji SKPD.
- 6) Penyiapan bahan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- 7) Penyelesaian permasalahan lingkup gaji.

b. Sub Bidang Belanja

Sub bidang belanja mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang belanja.
- 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup belanja.
- 3) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang belanja.
- 4) Pemeriksaan kelengkapan berkas pengajuan SPM belanja dari SKPD.
- 5) Penyiapan register penolakan Surat Perintah Membayara (SPM) belanja.
- 6) Penyiapan bahan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) belanja.

c. Sub Bidang Verifikasi dan Kas

Sub bidang verifikasi dan kas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyiapan rencana, program dan kegiatan sub bidang verifikasi dank as.
- 2) Penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup verifikasi dank as.
- 3) Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang verifikasi dank as.
- 4) Penyiapan bahan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) verifikasi dank as.
- 5) Meregister SP2D bidang verifikasi dan kas.

5) Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang akuntansi dan pelaporan dipimpin oleh kepala bidang, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala badan. Bidang akuntansi dan pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BPKAD lingkup akuntansi dan pelaporan.

Bidang akuntansi dan pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program dan kegiatan bidang akuntansi dan pelaporan.
- b. Penyusunan petunjuk teknis lingkup akuntansi dan pelaporan.
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang akuntansi dan pelaporan.

Sub bidang akuntansi dan pelaporan terdiri dari:

- a. Sub Bidang Akuntansi
- b. Sub Bidang pelaporan

4. Lokasi Instansi

Lokasi kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan berada di Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan.

5. Visi Dan Misi BPKAD Kota Medan

Visi BPKAD

- a. Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang professional

- b. Sumber daya Aparatur Pemerintah Kota Medan yang berwawasan
- c. Sumber daya Aparatur Pemerintah Kota Medan yang berpengabdian
- d. Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- e. Pengembangan dan peningkatan pengelolaan keuangan daerah.

Misi BPKAD

- a. Meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah Kota Medan.
- b. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah melalui teknologi yang lebih baik.
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas struktur organisasi perangkat daerah Kota Medan.

6. Jumlah Karyawan

Di Kantor Walikota Medan khususnya di BPKAD Kota Medan Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan terdapat beberapa orang yang bertugas, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bapak Sanusi Harahap S.Sos selaku Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
2. Bapak M. Sayuti S.E, M.M selaku Kasubbid Pembukuan
3. Bapak Risuhendi S.E, M.Si, AK. CA selaku Kasubbid Pengelolaan data dan Informasi
4. Bapak Vernando M.S. Hutagaol S.E
5. Ibu Lola Vianda S.E
6. Ibu Titin Herawati A.Md
7. Bapak Ahmad Fadli Nasution S.E, M.AP
8. Bapak Habiby A.Md
9. Ibu Yulia Ulfa Siagian
10. Ibu Leli
11. Bapak Darman A.Md

B. Deskripsi Data Penelitian

Setelah melakukan penelitian di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, penulis telah mendapatkan data sekunder berupa laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran dari tahun anggaran 2013 sampai dengan 2017.

1. Belanja Modal

Belanja Modal yang diteliti pada penelitian ini adalah Belanja Modal di Kota Medan Tahun Anggaran 2013-2017. Berikut ini Belanja Modal Tahun 2013-2017 yang disajikan dalam bulanan:

Tabel 4.1
Belanja Modal Tahun 2013-2017
(Bulanan)

Tahun	Mounthly	Belanja Modal	Tahun	Mounthly	Belanja Modal
2013	1	771.126.492.810,24	2015	7	861.469.346.163,55
2013	2	758.369.807.898,86	2015	8	872.553.084.512,40
2013	3	745.613.122.987,47	2015	9	883.636.822.861,24
2013	4	732.856.438.076,09	2015	10	894.720.561.210,09
2013	5	720.099.753.164,70	2015	11	905.804.299.558,93
2013	6	707.343.068.253,32	2015	12	916.888.037.907,78
2013	7	694.586.383.341,93	2016	1	918.530.629.078,89
2013	8	681.829.698.430,54	2016	2	920.173.220.249,99
2013	9	669.073.013.519,16	2016	3	921.815.811.421,10
2013	10	656.316.328.607,77	2016	4	923.458.402.592,21
2013	11	643.559.643.696,39	2016	5	925.100.993.763,31
2013	12	630.802.958.785,00	2016	6	926.743.584.934,42
2014	1	643.559.643.696,39	2016	7	928.386.176.105,53
2014	2	656.316.328.607,77	2016	8	930.028.767.276,63
2014	3	669.073.013.519,16	2016	9	931.671.358.447,74
2014	4	681.829.698.430,54	2016	10	933.313.949.618,85
2014	5	694.586.383.341,93	2016	11	934.956.540.789,95
2014	6	707.343.068.253,32	2016	12	936.599.131.961,06
2014	7	720.099.753.164,70	2017	1	941.672.203.622,80
2014	8	732.856.438.076,09	2017	2	946.745.275.284,55
2014	9	745.613.122.987,47	2017	3	951.818.346.946,30
2014	10	758.369.807.898,86	2017	4	956.891.418.608,04
2014	11	771.126.492.810,24	2017	5	961.964.490.269,79
2014	12	783.883.177.721,63	2017	6	967.037.561.931,53
2015	1	794.966.916.070,48	2017	7	972.110.633.593,28

2015	2	806.050.654.419,32	2017	8	977.183.705.255,02
2015	3	817.134.392.768,17	2017	9	982.256.776.916,77
2015	4	828.218.131.117,01	2017	10	987.329.848.578,51
2015	5	839.301.869.465,86	2017	11	992.402.920.240,25
2015	6	850.385.607.814,71	2017	12	997.475.991.902,00

2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli daerah yang diteliti pada penelitian ini adalah Pendapatan Asli daerah di Kota Medan Tahun Anggaran 2013-2017. Berikut ini Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013-2017 yang disajikan dalam bulanan:

Tabel 4.2
Pendapatan Asli Daerah Tahun 2013-2017
(Bulanan)

Tahun	Mounthly	PAD	Tahun	Mounthly	PAD
2013	1	1.369.406.414.264,46	2015	7	1.445.774.408.105,69
2013	2	1.354.566.713.799,30	2015	8	1.454.564.164.302,27
2013	3	1.339.727.013.334,14	2015	9	1.463.353.920.498,85
2013	4	1.324.887.312.868,99	2015	10	1.472.143.676.695,43
2013	5	1.310.047.612.403,83	2015	11	1.480.933.432.892,01
2013	6	1.295.207.911.938,67	2015	12	1.489.723.189.088,60
2013	7	1.280.368.211.473,51	2016	1	1.493.517.884.919,21
2013	8	1.265.528.511.008,36	2016	2	1.497.312.580.749,83
2013	9	1.250.688.810.543,20	2016	3	1.501.107.276.580,45
2013	10	1.235.849.110.078,04	2016	4	1.504.901.972.411,07
2013	11	1.221.009.409.612,88	2016	5	1.508.696.668.241,68
2013	12	1.206.169.709.147,73	2016	6	1.512.491.364.072,30
2014	1	1.221.009.409.612,88	2016	7	1.516.286.059.902,92
2014	2	1.235.849.110.078,04	2016	8	1.520.080.755.733,54
2014	3	1.250.688.810.543,20	2016	9	1.523.875.451.564,15
2014	4	1.265.528.511.008,36	2016	10	1.527.670.147.394,77
2014	5	1.280.368.211.473,51	2016	11	1.531.464.843.225,39
2014	6	1.295.207.911.938,67	2016	12	1.535.259.539.056,01
2014	7	1.310.047.612.403,83	2017	1	1.552.300.987.687,46
2014	8	1.324.887.312.868,99	2017	2	1.569.342.436.318,92
2014	9	1.339.727.013.334,14	2017	3	1.586.383.884.950,38
2014	10	1.354.566.713.799,30	2017	4	1.603.425.333.581,84
2014	11	1.369.406.414.264,46	2017	5	1.620.466.782.213,29
2014	12	1.384.246.114.729,62	2017	6	1.637.508.230.844,75
2015	1	1.393.035.870.926,20	2017	7	1.654.549.679.476,21

2015	2	1.401.825.627.122,78	2017	8	1.671.591.128.107,67
2015	3	1.410.615.383.319,36	2017	9	1.688.632.576.739,12
2015	4	1.419.405.139.515,94	2017	10	1.705.674.025.370,58
2015	5	1.428.194.895.712,52	2017	11	1.722.715.474.002,04
2015	6	1.436.984.651.909,11	2017	12	1.739.756.922.633,50

3. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer yang diteliti pada penelitian ini adalah Pendapatan Transfer di Kota Medan Tahun Anggaran 2013-2017. Berikut ini Pendapatan Transfer Tahun 2013-2017 yang disajikan dalam bulanan:

Tabel 4.3
Pendapatan Transfer Tahun 2013-2017
(Bulanan)

Tahun	Mounthly	Pendapatan Transfer	Tahun	Mounthly	Pendapatan Transfer
2013	1	2.608.117.718.711,16	2015	7	2.722.883.139.908,14
2013	2	2.558.365.723.920,33	2015	8	2.732.170.772.251,88
2013	3	2.508.613.729.129,50	2015	9	2.741.458.404.595,61
2013	4	2.458.861.734.338,66	2015	10	2.750.746.036.939,35
2013	5	2.409.109.739.547,83	2015	11	2.760.033.669.283,08
2013	6	2.359.357.744.757,00	2015	12	2.769.321.301.626,82
2013	7	2.309.605.749.966,16	2016	1	2.769.611.804.992,08
2013	8	2.259.853.755.175,33	2016	2	2.769.902.308.357,35
2013	9	2.210.101.760.384,50	2016	3	2.770.192.811.722,61
2013	10	2.160.349.765.593,66	2016	4	2.770.483.315.087,88
2013	11	2.110.597.770.802,83	2016	5	2.770.773.818.453,14
2013	12	2.060.845.776.012,00	2016	6	2.771.064.321.818,41
2014	1	2.110.597.770.802,83	2016	7	2.771.354.825.183,67
2014	2	2.160.349.765.593,66	2016	8	2.771.645.328.548,93
2014	3	2.210.101.760.384,50	2016	9	2.771.935.831.914,20
2014	4	2.259.853.755.175,33	2016	10	2.772.226.335.279,47
2014	5	2.309.605.749.966,16	2016	11	2.772.516.838.644,73
2014	6	2.359.357.744.757,00	2016	12	2.772.807.342.010,00
2014	7	2.409.109.739.547,83	2017	1	2.764.182.443.473,08
2014	8	2.458.861.734.338,66	2017	2	2.755.557.544.936,16
2014	9	2.508.613.729.129,50	2017	3	2.746.932.646.399,25
2014	10	2.558.365.723.920,33	2017	4	2.738.307.747.862,33
2014	11	2.608.117.718.711,16	2017	5	2.729.682.849.325,41
2014	12	2.657.869.713.502,00	2017	6	2.721.057.950.788,50

2015	1	2.667.157.345.845,73	2017	7	2.712.433.052.251,58
2015	2	2.676.444.978.189,47	2017	8	2.703.808.153.714,66
2015	3	2.685.732.610.533,20	2017	9	2.695.183.255.177,75
2015	4	2.695.020.242.876,93	2017	10	2.686.558.356.640,83
2015	5	2.704.307.875.220,67	2017	11	2.677.933.458.103,91
2015	6	2.713.595.507.564,41	2017	12	2.669.308.559.567,00

4. Pendapatan Perkapita

Pendapatan Perkapita yang diteliti pada penelitian ini adalah Pendapatan Perkapita masyarakat di Kota Medan. Berikut ini Pendapatan Perkapita Tahun 2013-2017 yang disajikan dalam bulanan:

Tabel 4.4
Pendapatan Perkapita Tahun 2013-2017
(Bulanan)

Tahun	Mounthly	Pendapatan Perkapita	Tahun	Mounthly	Pendapatan Perkapita
2013	1	53.515.363,75	2015	7	55.140.075,42
2013	2	53.394.237,50	2015	8	55.354.873,33
2013	3	53.273.111,25	2015	9	55.569.671,25
2013	4	53.151.985,00	2015	10	55.784.469,17
2013	5	53.030.858,75	2015	11	55.999.267,08
2013	6	52.909.732,50	2015	12	56.214.865,06
2013	7	52.788.606,25	2016	1	55.999.267,08
2013	8	52.667.480,00	2016	2	55.784.469,17
2013	9	52.546.353,75	2016	3	55.569.671,25
2013	10	52.425.227,50	2016	4	55.354.873,33
2013	11	52.304.101,25	2016	5	55.140.075,42
2013	12	52.182.975,08	2016	6	54.925.277,50
2014	1	52.304.101,25	2016	7	54.710.479,58
2014	2	52.425.227,50	2016	8	54.495.681,67
2014	3	52.546.353,75	2016	9	54.280.883,75
2014	4	52.667.480,00	2016	10	54.066.085,83
2014	5	52.788.606,25	2016	11	53.851.287,92
2014	6	52.909.732,50	2016	12	52.582.948,01
2014	7	53.030.858,75	2017	1	53.202.836,17
2014	8	53.151.985,00	2017	2	52.769.182,33
2014	9	53.273.111,25	2017	3	52.336.528,50
2014	10	53.394.237,50	2017	4	51.901.874,67
2014	11	53.515.363,75	2017	5	51.468.220,83
2014	12	53.636.490,01	2017	6	51.034.567,00
2015	1	53.851.287,92	2017	7	50.600.913,17

2015	2	54.066.085,83	2017	8	50.167.259,33
2015	3	54.280.883,75	2017	9	49.733.605,50
2015	4	54.495.681,67	2017	10	49.299.995,00
2015	5	54.710.479,58	2017	11	48.866.297,83
2015	6	54.925.277,50	2017	12	48.432.644,07

C. Hasil Penelitian

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (mean), dan nilai standar deviasi. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan dalam perhitungan statistik deskriptif adalah Belanja Modal, Pendapatan Asli daerah, Pendapatan Transfer dan Pendapatan Perkapita tahun 2013-2017. Berdasarkan analisis statistik deskriptif diperoleh gambaran sebagai berikut:

Tabel 4.5

Hasil Analisis Statistik Deskriptif Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer Dan Pendapatan Perkapita
Descriptive Statistics

	Belanja Modal	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	Pendapatan Perkapita
Mean	833.5418	1439.284	2468.832	53297.57
Median	855.9300	1441.375	2672.875	53273.11
Maximum	997.4800	1772.720	2772.880	56214.07
Minimum	630.8000	1206.170	1309.610	48432.64
Std. Dev.	115.3859	144.3094	406.7405	1773.813
Skewness	-0.257305	0.296658	-1.494501	-0.674208
Kurtosis	1.592734	2.300166	4.207549	3.405204
Sum	50012.51	86357.02	148129.9	3197854.
Sum Sq. Dev.	785520.5	1228686.	9760832.	1.86E+08
Observations	60	60	60	60

Sumber: Eviews 10 diolah

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Pendapatan Perkapita pada tabel 4.5, dapat dilihat bahwa nilai minimum Belanja Modal sebesar 630.8000 dan maximum 997.4800 dengan rata-rata sebesar 833.5418 dan standar deviasi sebesar 115,3859. Selanjutnya pada variabel Pendapatan Asli Daerah, nilai minimum sebesar 1206.170 dan nilai maksimum sebesar 1772,720 dengan rata-rata sebesar 1439.284 dan standar deviasi sebesar 144.3094.

Pada variabel Pendapatan Transfer nilai minimum sebesar 1309,610 dan nilai maksimum sebesar 2772,880 dengan rata-rata sebesar 2468,832 dan standar deviasi sebesar 406,7405. Kemudian variabel Pendapatan Perkapita nilai minimum sebesar 48432,64 dan nilai maksimum sebesar 56214,07 dengan rata-rata sebesar 53297,57 dan standar deviasi sebesar 1773,813.

2. Uji Asumsi Klasik

Suatu model dikatakan baik untuk alat prediksi apabila mempunyai sifat-sifat *best linier unbiased estimator* (BLUE). Disamping itu suatu model dikatakan cukup baik dan dapat dipakai untuk memprediksi apabila sudah lolos dari serangkaian uji asumsi ekonometrika yang melandasinya. Suatu model regresi berganda yang digunakan untuk menguji hipotesa harus memenuhi asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan untuk mendapatkan model regresi yang tidak biasa dan efisien.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal.. Adapun hasil perhitungannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 4.6
Hasil Uji Normalitas

	RESID	X1	X2	X3	Y
Mean	5.55E-05	833.5418	1439.284	2468.832	53297.57
Median	0.000190	855.9300	1441.375	2672.875	53273.11
Maximum	0.012888	997.4800	1772.720	2772.880	56214.07
Minimum	-0.030792	630.8000	1206.170	1309.610	48432.64
Std. Dev.	0.007512	115.3859	144.3094	406.7405	1773.813
Skewness	-0.960934	-0.257305	0.296658	-1.494501	-0.674208
Kurtosis	5.803859	1.592734	2.300166	4.207549	3.405204
Jarque-Bera	28.88800	5.613055	2.104474	25.98077	4.956037
Probability	0.161143	0.060414	0.349156	0.231347	0.083909
Sum	0.003330	50012.51	86357.02	148129.9	3197854.
Sum Sq. Dev.	0.003330	785520.5	1228686.	9760832.	1.86E+08
Observations	60	60	60	60	60

Dari tabel 4.6 menunjukkan hasil uji normalitas seluruh variabel menggunakan uji probabilitas dari statistik J-B di atas, nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal. Data yang berdistribusi normal dinyatakan dapat mewakili populasi.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Jika pada model regresi terjadi multikolinearitas, maka koefisien regresi tidak dapat ditaksir dan nilai *standard error* menjadi tidak terhingga. Dalam penelitian ini gejala multikolinearitas dapat dilihat dari nilai korelasi antar variabel yang terdapat dalam matriks korelasi. Antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,9)

maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.7
Hasil Uji Multikolinearitas

	Belanja Modal	Pendapatan Asli daerah	Pendapatan Transfer
Belanja Modal	1,000000	0.866592	0.602975
Pendapatan Asli Daerah	0.866592	1,000000	0.549608
Pendapatan Transfer	0.602975	0.549608	1,000000

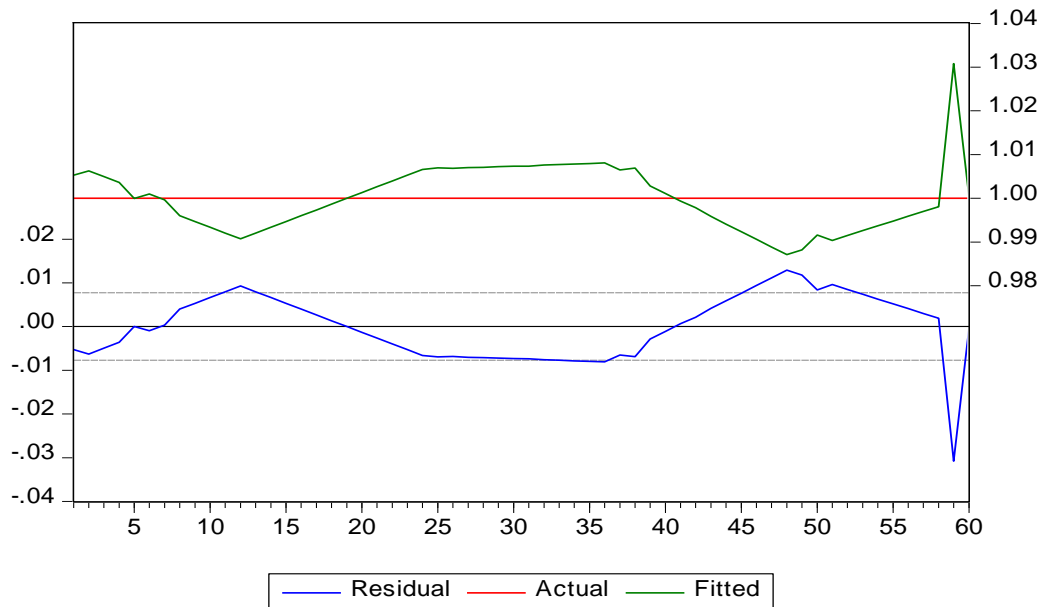
Sumber: Eviews 10 diolah

Dari tabel 4.7 dapat dilihat bahwasannya nilai korelasi dari setiap variabel independen lebih kecil dari 0,9 maka dapat disimpulkan tidak ada gejala multikolinearitas antara variabel independen.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan *variance residual* suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Hasil output heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.2
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Eviews 10 diolah

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas secara grafik pada gambar diatas, dapat dilihat bahwa residualnya tidak membentuk pola tertentu, sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Sedangkan hasil uji heteroskedastisitas berdasarkan uji white memiliki hasil sebagai berikut:

Tabel 4.8
Hasil Heteroskedastisitas Uji White
Heteroskedasticity Test: White

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	7.575263	Prob. F(4,55)	0.0001
Obs*R-squared	21.31349	Prob. Chi-Square(4)	0.3064
Scaled explained SS	44.32653	Prob. Chi-Square(4)	0.0007

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 08/05/19 Time: 20:51

Sample: 1 60

Included observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.002587	0.000709	-3.649962	0.0006
X1^2	-2.68E-09	6.44E-10	-4.158319	0.0001
X2^2	1.34E-09	3.03E-10	4.428881	0.0000
X3^2	-2.15E-12	1.01E-11	-0.213129	0.8320
R-squared	0.355225	Mean dependent var		5.55E-05
Adjusted R-squared	0.308332	S.D. dependent var		0.000122
S.E. of regression	0.000102	Akaike info criterion		-15.46923
Sum squared resid	5.69E-07	Schwarz criterion		-15.29470
Log likelihood	469.0768	Hannan-Quinn criter.		-15.40096
F-statistic	7.575263	Durbin-Watson stat		1.850762
Prob(F-statistic)	0.000062			

Sumber: Eviews 10 diolah

Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji white adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai Prob. Chi-squared lebih besar dari 0,05 maka kesimpulannya adalah tidak terjadi gejala heteroskedastisitas
2. Jika nilai Prob. Chi-squared lebih kecil dari 0,05 maka kesimpulannya adalah terjadi gejala heteroskedastisitas.

Pada tabel diatas, diketahui nilai Prob. Chi-squared sebesar $0.3064 > 0,05$ maka disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokolerasi

Uji autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (tahun sebelumnya). Autokolerasi dalam penelitian ini menggunakan uji Breusch –Godfrey (BG Test). Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jika nilai Prob. Chi-squared dari Obs *R-squared lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi autokolerasi.
2. Jika nilai Prob. Chi-squared dari Obs *R-squared lebih kecil dari 0,05 maka terjadi autokolerasi.

Tabel 4.9
Hasil Uji Autokolerasi
Breusch Godfrey Serial Correlation LM Test

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	4.86130	Prob. F(2,54)	4.91190
Obs*R-squared	2.36472	Prob. Chi-Square(2)	2.99822

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 08/05/19 Time: 21:07

Sample: 1 60

Included observations: 60

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	8.16E-05	1.89E-05	4.321055	0.0001
X2	-7.17E-05	1.43E-05	-5.014062	0.0000

X3	-3.82E-07	1.74E-06	-0.219700	0.8269
RESID(-1)	-0.120811	0.142523	-0.847662	0.4004
RESID(-2)	1.278228	0.192051	6.655657	0.0000
<hr/>				
R-squared	0.706062	Mean dependent var	5.55E-05	
Adjusted R-squared	0.678846	S.D. dependent var	0.007512	
S.E. of regression	0.004257	Akaike info criterion	-7.985713	
Sum squared resid	0.000979	Schwarz criterion	-7.776279	
Log likelihood	245.5714	Hannan-Quinn criter.	-7.903792	
Durbin-Watson stat	2.667360			

Sumber: Eviews 10 diolah

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai Prob. Chi-squared dari Obs *R-squared sebesar 2.99822 lebih besar dari 0,05 maka dalam model persamaan regresi ini menunjukkan tidak terjadi autokolerasi.

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4.10
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 08/05/19 Time: 20:37

Sample: 1 60

Included observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	72937.21	1057.465	8.97366	0.0000
X1	53.83822	2.643027	1.36991	1.8143
X2	45.20901	2.018021	3.40264	0.0000
X3	0.223812	0.230043	0,46723	0.3352

R-squared	0.703451	Mean dependent var	53297.57
Adjusted R-squared	0.704279	S.D. dependent var	1773.813
S.E. of regression	565.7364	Akaike info criterion	15.57847
Sum squared resid	17923229	Schwarz criterion	15.71810
Log likelihood	-463.3542	Hannan-Quinn criter.	15.63309
F-statistic	174.6717	Durbin-Watson stat	0.619739
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Eviews 10 diolah

Berdasarkan tabel 4.10 diatas diperoleh persamaan linier sebagai berikut:

$$Y = 72937,21 + 53.83822X_1 + 45.20901X_2 + 0.223812X_3$$

Dimana:

Y : Pendapatan Perkapita

X1 : Belanja Modal

X2 : Pendapatan Asli Daerah

X3 : Pendapatan Transfer

Berdasarkan tabel 4.10 disajikan kembali nilai koefisien regresi untuk masing-masing variabel bebas. Untuk variabel Belanja Modal bernilai 53.83822 (bernilai positif), berarti Belanja Modal memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Perkapita. Variabel Pendapatan Asli Daerah bernilai 45.20901 (bernilai positif), berarti Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Perkapita. Kemudian pada variabel Pendapatan Transfer bernilai 0.223812 (bernilai positif), sehingga Pendapatan Transfer memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Perkapita.

4. Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinan (R^2)

Nilai koefisien korelasi R menunjukkan seberapa besar korelasi atau hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel dependen. Koefisien korelasi dikatakan kuat apabila nilai R berada di atas 0,5 dan mendekati 1. Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan seberapa besar variabel independen menjelaskan variabel dependennya. Nilai *adjusted R square* adalah nol sampai

dengan satu. Apabila nilai *adjusted R square* semakin mendekati satu, maka variabel-variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sebaliknya, semakin kecil nilai *adjusted R square*, maka kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen semakin terbatas. Nilai *adjusted R square* memiliki kelemahan yaitu nilai *adjusted R square* akan meningkat setiap ada penambahan satu variabel independen meskipun variabel independen tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, digunakan nilai *adjusted R square* untuk mengevaluasi mana model regresi terbaik.

Tabel 4.11
Hasil Uji Koefisien Determinasi R²

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 08/05/19 Time: 20:37

Sample: 1 60

Included observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	72937.21	1057.465	8.97366	0.0000
X1	53.83822	2.643027	1.36991	1.8143
X2	45.20901	2.018021	3.40264	0.0000
X3	0.223812	0.230043	1.12916	0.3350
R-squared	0.703451	Mean dependent var	53297.57	
Adjusted R-squared	0.898279	S.D. dependent var	1773.813	
S.E. of regression	565.7364	Akaike info criterion	15.57847	
Sum squared resid	17923229	Schwarz criterion	15.71810	
Log likelihood	-463.3542	Hannan-Quinn criter.	15.63309	

F-statistic	174.6717	Durbin-Watson stat	0.619739
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Eviews 10 diolah

Hasil analisis regresi pada tabel diatas, menunjukkan bahwa besar koefisien determinasi pengaruh variabel Belanja Modal, PAD dan Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Perkapita sebesar 0,703451. Hal ini menunjukkan bahwa besar kontribusi Belanja Modal, PAD dan Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Perkapita sebesar 70% sedangkan sisanya sebesar 30% dipengaruhi oleh variabel lain.

b. Uji F (Uji Simultan)

Uji F atau dikenal dengan uji simultan adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Langkah-langkah dalam pengambilan keputusan untuk uji F adalah:

- a) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai $Prob. F < \alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel-variabel dependen.
- b) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ dan nilai $Prob. F > \alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel-variabel dependen.

Tabel 4.12

Hasil Uji F

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 08/05/19 Time: 20:37

Sample: 1 60

Included observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	72937.21	1057.465	8.97366	0.0000
X1	53.83822	2.643027	1.36991	1.8143
X2	45.20901	2.018021	3.40264	0.0000
X3	0.223812	0.230043	1.12916	0.3350
R-squared	0.703451	Mean dependent var	53297.57	
Adjusted R-squared	0.898279	S.D. dependent var	1773.813	
S.E. of regression	565.7364	Akaike info criterion	15.57847	
Sum squared resid	17923229	Schwarz criterion	15.71810	
Log likelihood	-463.3542	Hannan-Quinn criter.	15.63309	
F-statistic	174.6717	Durbin-Watson stat	0.619739	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Eviews 10 diolah

Pada Tabel 4.12, di dapat F_{hitung} 174.6717 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000. Sedangkan F_{tabel} diketahui sebesar 2,77. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($174,6717 > 2,77$) dan serta nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Transfer secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Perkapita di Kota Medan.

c. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji T)

Uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variable penjelas/dependen secara individual dalam menerangkan variable independen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan secara 0,05 ($\alpha=5\%$). Ketentuan penolakan atau penerimaan hipotesis adalah sebagai berikut:

- a) Jika nilai probabilitas $t > 0,05$ maka H_0 diterima dan menolak H_a (koefisien regresi tidak signifikan). Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variable dependen.
- b) Jika nilai probabilitas $t < 0,05$ maka H_0 ditolak dan menerima H_a (koefisien regresi signifikan). Ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.13
Hasil Uji T

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 08/05/19 Time: 20:37

Sample: 1 60

Included observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	72937.21	1057.465	8.97366	0.0000
X1	53.83822	2.643027	1.36991	1.8143
X2	45.20901	2.018021	3.40264	0.0000
X3	0.223812	0.230043	1.12916	0.3350
R-squared	0.703451	Mean dependent var	53297.57	
Adjusted R-squared	0.898279	S.D. dependent var	1773.813	
S.E. of regression	565.7364	Akaike info criterion	15.57847	
Sum squared resid	17923229	Schwarz criterion	15.71810	
Log likelihood	-463.3542	Hannan-Quinn criter.	15.63309	
F-statistic	174.6717	Durbin-Watson stat	0.619739	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Eviews 10 diolah

Hasil uji T pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengujian terhadap Belanja Modal

Berdasarkan tabel diatas diketahui t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} yaitu $1,36991 < 2,00324$ dengan nilai probabilitas $1,8143 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan H_0 diterima dan menolak H_a . Artinya secara parsial Belanja Modal berpengaruh tetapi tidak signifikan (sangat lemah) terhadap Pendapatan Perkapita di Kota Medan.

2. Pengujian terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan tabel diatas diketahui t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu $3,40264 > 2,00324$ dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan H_a diterima dan menolak H_0 . Artinya secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Perkapita di Kota Medan.

3. Pengujian terhadap Pendapatan Transfer

Berdasarkan tabel diatas diketahui t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} yaitu $1,12916 < 2,00324$ dengan nilai signifikan $0,3350 > 0,05$. Dengan demikian dapat disimpulkan H_0 diterima dan menolak H_a . Artinya secara parsial Pendapatan Transfer berpengaruh tetapi tidak signifikan (sangat lemah) terhadap Pendapatan Perkapita di Kota Medan.

D. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh belanja modal, pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer terhadap pendapatan perkapita di Kota Medan tahun 2013-2017 dilakukan pembahasan sebagai berikut:

1. Pengujian Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Perkapita

Dari hasil pengujian secara simultan (Uji F), diketahui bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($174,6717 > 2,77$) dan serta nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$, maka secara simultan Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Perkapita. Hal ini dapat disimpulkan bahwasannya kenaikan

Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer mampu meningkatkan Pendapatan Perkapita masyarakat di suatu daerah begitu juga sebaliknya.

Pendapatan Asli daerah dan Pendapatan Transfer merupakan salah satu penerimaan yang diterima suatu daerah. Semakin besar penerimaan Pendapatan di suatu daerah maka akan mengakibatkan semakin meningkatnya pula Belanja Modal yang dilakukan pemerintah. Semakin baik Belanja Modal yang dikeluarkan pemerintah untuk pembangunan suatu daerah maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Perkapita masyarakat di suatu daerah.

2. Pengujian Belanja Modal terhadap Pendapatan Perkapita

Dari hasil pengujian secara parsial (Uji T), diketahui bahwa t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} yaitu $1,36991 < 2,00324$ dengan nilai probabilitas $1,8143 > 0,05$ maka secara parsial Belanja Modal berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap Pendapatan Perkapita. Artinya Belanja Modal mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Perkapita namun sangat lemah.

Pembangunan sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah berpengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pelayanan sektor publik secara berkelanjutan akan meningkatkan sarana dan prasarana publik, investasi pemerintah juga meliputi perbaikan fasilitas pendidikan, kesehatan dan sarana penunjang lainnya. Syarat fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaaan modal pembangunan yang seimbang dengan peningkatan PDB/PDRB. Pembentukan modal tersebut harus didefinisikan secara luas sehingga mencakup semua pengeluaran yang sifatnya menaikkan produktivitas. Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk didaerah yang bersangkutan, seiring

dengan meningkatnya pendapatan masyarakat. Jika pemda menetapkan anggaran belanja pembangunan lebih besar dari pengeluaran rutin, maka kebijakan ekspansi anggaran daerah ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. belanja modal mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi belanja modal untuk pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian akan mendorong tingkat produktivitas penduduk. Pada gilirannya hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum yang tercermin dalam pendapatan perkapita. Namun pemerintah Kota Medan belum optimal dalam pengalokasian Belanja Modal untuk pembangunan ekonomi sehingga belum mampu meningkatkan Pendapatan Perkapita di Kota Medan.

3. Pengujian Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Perkapita

Dari hasil pengujian secara parsial (Uji T), diketahui bahwa t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} yaitu $3,40264 > 2,00324$ dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ maka secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Perkapita. Hal ini dapat disimpulkan bahwasannya kenaikan Pendapatan Asli Daerah akan meningkatkan Pendapatan Perkapita masyarakat di suatu daerah. Begitu juga dengan penurunan Pendapatan Asli Daerah akan menurunkan Pendapatan Perkapita masyarakat di suatu daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi. Untuk itu, pendapatan asli daerah harus diupayakan agar selalu meningkat yang bertujuan untuk mengatur alokasi suatu kegiatan ekonomi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga pendapatan perkapita masyarakatnya juga semakin meningkat.

4. Pengujian Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Perkapita

Dari hasil pengujian secara parsial (Uji T), diketahui bahwa t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} yaitu $1.12916 < 2,00324$ dengan nilai signifikan $0,3350 > 0,05$ maka secara parsial Pendapatan Transfer berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap Pendapatan Perkapita. Artinya Pendapatan Transfer memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Perkapita namun sangat lemah.

Pendapatan Transfer merupakan sisi penerimaan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dimana penerimaan akan terhimpun menjadi modal. Selanjutnya melalui modal tersebut maka daerah akan melakukannya untuk belanja pembangunan sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan Pendapatan Perkapita masyarakat juga akan semakin meningkat. Namun pemerintah belum mampu mengalokasikan penerimaan dengan optimal yang digunakan untuk pembangunan ekonomi di suatu daerah sehingga belum mampu meningkatkan Pendapatan Perkapita di Kota Medan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab IV, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini baik secara simultan maupun parsial adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan secara parsial Belanja Modal tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Perkapita di Kota Medan.
2. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh dan signifikan terhadap Pendapatan Perkapita di Kota Medan.
3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan secara parsial Pendapatan Transfer tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap Pendapatan Perkapita di Kota Medan.
4. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan secara simultan Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Perkapita di Kota Medan. Kemudian dari hasil uji koefisien determinasi disimpulkan besar kontribusi Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer terhadap Pendapatan Perkapita sebesar 70% sedangkan sisanya 30% dipengaruhi oleh variabel lain. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwasannya Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer bersama – sama mempengaruhi Pendapatan Perkapita di Kota Medan tahun 2013-2017. Sehingga hipotesis diterima.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah harus memanfaatkan Pendapatan Asli Daerah secara baik dan efisien agar Pendapatan Perkapita masyarakat di Kota Medan meningkat.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah luas penelitian dan waktu penelitian sehingga akan diperoleh hasil penelitian yang lebih akurat. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan mengambil sampel dari kabupaten/kota daerah lain agar dapat membandingkan hasil penelitian.
3. Peneliti selanjutnya juga dapat menambah variabel independen lainnya yang berpengaruh terhadap Pendapatan Perkapita untuk menambah variasi penelitian.
4. Penelitian ini dilakukan dalam periode 5 tahun yaitu dari 2013 sampai dengan 2017. Untuk itu peneliti dapat memberikan saran agar dapat menambah periode waktu penelitian agar dapat melakukan generalisasi terhadap penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Publik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ahmad, Fikri Rijalul. 2017. *Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Aulia, Hasbi. 2017. *Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Perkapita Di Pemkab/Pemko Provinsi Sumatera Utara*. Universitas Sumatera Utara Medan.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2007. *Alqur'an dan Terjemahan*. Bogor.
- Dwi Anggoro, Damas. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang:UB Press.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Penerbit UNDIP.
- Gunadi, Aloysius dan Brata. 2004. *Komposisi Penerimaan Sektor Publik Dan Pertumbuhan Ekonomi Regional*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya.
- Harahap, Riva Ubar. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pada Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Kitabah, Vol. 1 1 Januari-Juni 2017.
- Hasan, Iqbal. 2008. *Analisis Data Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Halim, Abdul. 2018. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Huda, Nurul. 2008. *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana.
- Indra, Bastian. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Jayanti, Widya. 2013. *Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Perkapita*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mahmudi. 2006. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Majidi N. 1997. *Anggaran Pembangunan Dan Ketimpangan Ekonomi Antar Daerah*. Jakarta: Prisma LP3ES.

- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi .
- Nordiawan, Deddi dan Ayuningtyas Hertianti. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Panglima, Saragih Juli. 2003. *Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*, Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Pramesti, Getut. 2016. *Statistika Lengkap Secara Teori Dan Aplikasi Dengan SPSS 23*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Purwanta, Wiji. 1997. *Pengantar Belajar Ekonomi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Puspita Devi Purwanto, Fiona. 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rasyid, Suherman. 2013. *Pengantar Teori Ekonomi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Renyowijoyo, Muindro. 2008. *Akuntansi Sektor Publik Non Laba*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ritonga. 2000. *Pelajaran Ekonomi 2*. Jakarta: Erlangga.
- Siregar, Sabar. 2016. Universitas Sumatera Utara Medan.
- Samueelson, Paul A. 1992. *Ekonomi Makro*. Jakarta: Erlangga.
- Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 2 Tentang Laporan Realisasi Anggaran.
- Sudaryo, Yoyo. 2017. *Keuangan Di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sugiyono. 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Gramedia.
- Sujarweni, V Wiranta. 2015. *SPSS Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers.
- Sukirno, Sadono. 2005. *Makro Ekonomi Modern, Edisi Pertama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Suparmoko. 2012. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Suryani. 2015. *Metode Riset Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri.
- Tarigan, Azhari Akmal. 2012. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Al-Quran: Sebuah Eksplorasi Melalui Kata-Kata Kunci*, Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Tika, Muhammad Pabundu. 2006. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ulum, Ihyaul. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: UMM Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun tentang Pemerintah Daerah Pasal 156 ayat (1).
- Undang-Undang Republik Indonesian Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
- Wahyu, Wing dan Winarno. 2011. *Analisis Ekonomika Dan Statistik Dengan Eviews*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antata Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grofindo Persada.

www.bps.go.id

LAMPIRAN

Belanja Modal Kota Medan Tahun 2013-2017

Tahun	Realisasi
2013	630.802.958.785,00
2014	783.883.177.721,63
2015	916.888.037.907,78
2016	936.599.131.961,06
2017	997.475.991.902,00

Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 203-2017

Tahun	Realisasi
2013	1.206.169.709.147,73
2014	1.384.246.114.729,62
2015	1.489.723.189.088,60
2016	1.535.259.539.3056,01
2017	1.739.756.922.633,50

Pendapatan Transfer Kota Medan Tahun 2013-2017

Tahun	Realisasi
2013	2.060.845.776.012,00
2014	2.657.869.713.502,00
2015	2.769.321.301.626,82
2016	2.772.807.342.010,00
2017	2.669.308.559.567,00

PDRB, Jumlah Penduduk dan Pendapatan Perkapita Kota Medan

Tahun 2013-2017

Tahun	PDRB	Jumlah Penduduk	Pendapatan Perkapita (PDRB/Jumlah penduduk)
2013	110.795.416.000.000	2.123.210	52.182.975,08
2014	117.525.059.000.000	2.191.140	53.636.490,01
2015	124.269.931.000.000	2.210.624	56.214.865,06
2016	132.062.863.000.000	2.511.515	52.582.948,01
2017	139.730.214.000.000	2.885.042	48.432.644,07

Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan

Pendapatan Perkapita

Tahun 2013-2017

Hasil Interpolasi Bulanan

Tahun	Mounthly	Belanja Modal	Pendapatan Asli daerah	Pendapatan Transfer	Pendapatan Perkapita
2013	1	771.126.492.810,24	1.369.406.414.264,46	2.608.117.718.711,16	53.515.363,75
2013	2	758.369.807.898,86	1.354.566.713.799,30	2.558.365.723.920,33	53.394.237,50
2013	3	745.613.122.987,47	1.339.727.013.334,14	2.508.613.729.129,50	53.273.111,25
2013	4	732.856.438.076,09	1.324.887.312.868,99	2.458.861.734.338,66	53.151.985,00
2013	5	720.099.753.164,70	1.310.047.612.403,83	2.409.109.739.547,83	53.030.858,75
2013	6	707.343.068.253,32	1.295.207.911.938,67	2.359.357.744.757,00	52.909.732,50
2013	7	694.586.383.341,93	1.280.368.211.473,51	2.309.605.749.966,16	52.788.606,25
2013	8	681.829.698.430,54	1.265.528.511.008,36	2.259.853.755.175,33	52.667.480,00
2013	9	669.073.013.519,16	1.250.688.810.543,20	2.210.101.760.384,50	52.546.353,75
2013	10	656.316.328.607,77	1.235.849.110.078,04	2.160.349.765.593,66	52.425.227,50

2013	11	643.559.643.696,39	1.221.009.409.612,88	2.110.597.770.802,83	52.304.101,25
2013	12	630.802.958.785,00	1.206.169.709.147,73	2.060.845.776.012,00	52.182.975,08
2014	1	643.559.643.696,39	1.221.009.409.612,88	2.110.597.770.802,83	52.304.101,25
2014	2	656.316.328.607,77	1.235.849.110.078,04	2.160.349.765.593,66	52.425.227,50
2014	3	669.073.013.519,16	1.250.688.810.543,20	2.210.101.760.384,50	52.546.353,75
2014	4	681.829.698.430,54	1.265.528.511.008,36	2.259.853.755.175,33	52.667.480,00
2014	5	694.586.383.341,93	1.280.368.211.473,51	2.309.605.749.966,16	52.788.606,25
2014	6	707.343.068.253,32	1.295.207.911.938,67	2.359.357.744.757,00	52.909.732,50
2014	7	720.099.753.164,70	1.310.047.612.403,83	2.409.109.739.547,83	53.030.858,75
2014	8	732.856.438.076,09	1.324.887.312.868,99	2.458.861.734.338,66	53.151.985,00
2014	9	745.613.122.987,47	1.339.727.013.334,14	2.508.613.729.129,50	53.273.111,25
2014	10	758.369.807.898,86	1.354.566.713.799,30	2.558.365.723.920,33	53.394.237,50
2014	11	771.126.492.810,24	1.369.406.414.264,46	2.608.117.718.711,16	53.515.363,75
2014	12	783.883.177.721,63	1.384.246.114.729,62	2.657.869.713.502,00	53.636.490,01
2015	1	794.966.916.070,48	1.393.035.870.926,20	2.667.157.345.845,73	53.851.287,92
2015	2	806.050.654.419,32	1.401.825.627.122,78	2.676.444.978.189,47	54.066.085,83
2015	3	817.134.392.768,17	1.410.615.383.319,36	2.685.732.610.533,20	54.280.883,75
2015	4	828.218.131.117,01	1.419.405.139.515,94	2.695.020.242.876,93	54.495.681,67
2015	5	839.301.869.465,86	1.428.194.895.712,52	2.704.307.875.220,67	54.710.479,58
2015	6	850.385.607.814,71	1.436.984.651.909,11	2.713.595.507.564,41	54.925.277,50
2015	7	861.469.346.163,55	1.445.774.408.105,69	2.722.883.139.908,14	55.140.075,42
2015	8	872.553.084.512,40	1.454.564.164.302,27	2.732.170.772.251,88	55.354.873,33
2015	9	883.636.822.861,24	1.463.353.920.498,85	2.741.458.404.595,61	55.569.671,25
2015	10	894.720.561.210,09	1.472.143.676.695,43	2.750.746.036.939,35	55.784.469,17
2015	11	905.804.299.558,93	1.480.933.432.892,01	2.760.033.669.283,08	55.999.267,08
2015	12	916.888.037.907,78	1.489.723.189.088,60	2.769.321.301.626,82	56.214.865,06
2016	1	918.530.629.078,89	1.206.169.709.147,73	2.769.611.804.992,08	55.999.267,08
2016	2	920.173.220.249,99	1.221.009.409.612,88	2.769.902.308.357,35	55.784.469,17
2016	3	921.815.811.421,10	1.235.849.110.078,04	2.770.192.811.722,61	55.569.671,25
2016	4	923.458.402.592,21	1.250.688.810.543,20	2.770.483.315.087,88	55.354.873,33

2016	5	925.100.993.763,31	1.265.528.511.008,36	2.770.773.818.453,14	55.140.075,42
2016	6	926.743.584.934,42	1.280.368.211.473,51	2.771.064.321.818,41	54.925.277,50
2016	7	928.386.176.105,53	1.295.207.911.938,67	2.771.354.825.183,67	54.710.479,58
2016	8	930.028.767.276,63	1.310.047.612.403,83	2.771.645.328.548,93	54.495.681,67
2016	9	931.671.358.447,74	1.324.887.312.868,99	2.771.935.831.914,20	54.280.883,75
2016	10	933.313.949.618,85	1.339.727.013.334,14	2.772.226.335.279,47	54.066.085,83
2016	11	934.956.540.789,95	1.354.566.713.799,30	2.772.516.838.644,73	53.851.287,92
2016	12	936.599.131.961,06	1.493.517.884.919,21	2.772.807.342.010,00	52.582.948,01
2017	1	941.672.203.622,80	1.497.312.580.749,83	2.764.182.443.473,08	53.202.836,17
2017	2	946.745.275.284,55	1.501.107.276.580,45	2.755.557.544.936,16	52.769.182,33
2017	3	951.818.346.946,30	1.504.901.972.411,07	2.746.932.646.399,25	52.336.528,50
2017	4	956.891.418.608,04	1.508.696.668.241,68	2.738.307.747.862,33	51.901.874,67
2017	5	961.964.490.269,79	1.512.491.364.072,30	2.729.682.849.325,41	51.468.220,83
2017	6	967.037.561.931,53	1.516.286.059.902,92	2.721.057.950.788,50	51.034.567,00
2017	7	972.110.633.593,28	1.520.080.755.733,54	2.712.433.052.251,58	50.600.913,17
2017	8	977.183.705.255,02	1.523.875.451.564,15	2.703.808.153.714,66	50.167.259,33
2017	9	982.256.776.916,77	1.527.670.147.394,77	2.695.183.255.177,75	49.733.605,50
2017	10	987.329.848.578,51	1.531.464.843.225,39	2.686.558.356.640,83	49.299.995,00
2017	11	992.402.920.240,25	1.535.259.539.056,01	2.677.933.458.103,91	48.866.297,83
2017	12	997.475.991.902,00	1.552.300.987.687,46	2.669.308.559.567,00	48.432.644,07

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Hasil Uji Normalitas

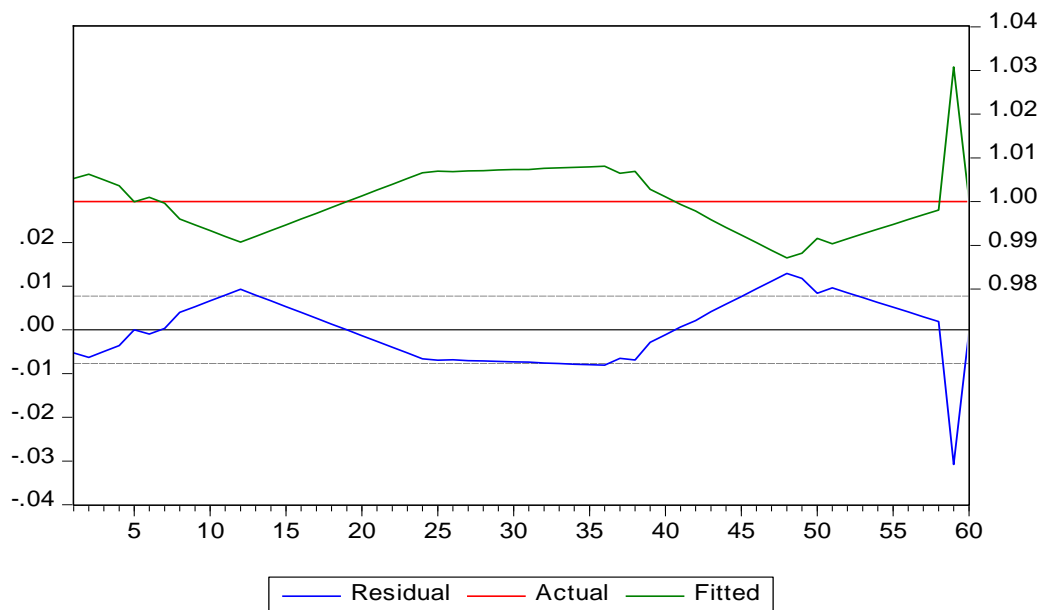
	RESID	X1	X2	X3	Y
Mean	5.55E-05	833.5418	1439.284	2468.832	53297.57
Median	0.000190	855.9300	1441.375	2672.875	53273.11
Maximum	0.012888	997.4800	1772.720	2772.880	56214.07
Minimum	-0.030792	630.8000	1206.170	1309.610	48432.64
Std. Dev.	0.007512	115.3859	144.3094	406.7405	1773.813
Skewness	-0.960934	-0.257305	0.296658	-1.494501	-0.674208
Kurtosis	5.803859	1.592734	2.300166	4.207549	3.405204

Jarque-Bera	28.88800	5.613055	2.104474	25.98077	4.956037
Probability	0.161143	0.060414	0.349156	0.231347	0.083909
Sum	0.003330	50012.51	86357.02	148129.9	3197854.
Sum Sq. Dev.	0.003330	785520.5	1228686.	9760832.	1.86E+08
Observations	60	60	60	60	60

Hasil Uji Multikolinearitas

	Belanja Modal	Pendapatan Asli daerah	Pendapatan Transfer
Belanja Modal	1,000000	0.866592	0.602975
Pendapatan Asli Daerah	0.866592	1,000000	0.549608
Pendapatan Transfer	0.602975	0.549608	1,000000

Hasil Uji Heteroskedastisitas



Hasil Heteroskedastisitas Uji White

Heteroskedasticity Test: White

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	7.575263	Prob. F(4,55)	0.0001
Obs*R-squared	21.31349	Prob. Chi-Square(4)	0.3064
Scaled explained SS	44.32653	Prob. Chi-Square(4)	0.0007

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 08/05/19 Time: 20:51

Sample: 1 60

Included observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.002587	0.000709	-3.649962	0.0006
X1^2	-2.68E-09	6.44E-10	-4.158319	0.0001
X2^2	1.34E-09	3.03E-10	4.428881	0.0000
X3^2	-2.15E-12	1.01E-11	-0.213129	0.8320

R-squared	0.355225	Mean dependent var	5.55E-05
Adjusted R-squared	0.308332	S.D. dependent var	0.000122
S.E. of regression	0.000102	Akaike info criterion	-15.46923
Sum squared resid	5.69E-07	Schwarz criterion	-15.29470
Log likelihood	469.0768	Hannan-Quinn criter.	-15.40096
F-statistic	7.575263	Durbin-Watson stat	1.850762
Prob(F-statistic)	0.000062		

Hasil Uji Autokolerasi
Breusch Godfrey Serial Correlation LM Test

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	4.86130	Prob. F(2,54)	4.91190
Obs*R-squared	2.36472	Prob. Chi-Square(2)	2.99822

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 08/05/19 Time: 21:07

Sample: 1 60

Included observations: 60

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	8.16E-05	1.89E-05	4.321055	0.0001
X2	-7.17E-05	1.43E-05	-5.014062	0.0000
X3	-3.82E-07	1.74E-06	-0.219700	0.8269
RESID(-1)	-0.120811	0.142523	-0.847662	0.4004
RESID(-2)	1.278228	0.192051	6.655657	0.0000
R-squared	0.706062	Mean dependent var	5.55E-05	
Adjusted R-squared	0.678846	S.D. dependent var	0.007512	
S.E. of regression	0.004257	Akaike info criterion	-7.985713	
Sum squared resid	0.000979	Schwarz criterion	-7.776279	
Log likelihood	245.5714	Hannan-Quinn criter.	-7.903792	
Durbin-Watson stat	2.667360			

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 08/05/19 Time: 20:37

Sample: 1 60

Included observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	72937.21	1057.465	8.97366	0.0000
X1	53.83822	2.643027	1.36991	1.8143
X2	45.20901	2.018021	3.40264	0.0000
X3	0.223812	0.230043	1.12916	0.3350
R-squared	0.703451	Mean dependent var	53297.57	
Adjusted R-squared	0.898279	S.D. dependent var	1773.813	
S.E. of regression	565.7364	Akaike info criterion	15.57847	
Sum squared resid	17923229	Schwarz criterion	15.71810	
Log likelihood	-463.3542	Hannan-Quinn criter.	15.63309	
F-statistic	174.6717	Durbin-Watson stat	0.619739	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Hasil Uji Koefisien Determinasi R₂

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 08/05/19 Time: 20:37

Sample: 1 60

Included observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
----------	-------------	------------	-------------	-------

C	72937.21	1057.465	8.97366	0.0000
X1	53.83822	2.643027	1.36991	1.8143
X2	45.20901	2.018021	3.40264	0.0000
X3	0.223812	0.230043	1.12916	0.3350
<hr/>				
R-squared	0.703451	Mean dependent var	53297.57	
Adjusted R-squared	0.898279	S.D. dependent var	1773.813	
S.E. of regression	565.7364	Akaike info criterion	15.57847	
Sum squared resid	17923229	Schwarz criterion	15.71810	
Log likelihood	-463.3542	Hannan-Quinn criter.	15.63309	
F-statistic	174.6717	Durbin-Watson stat	0.619739	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Hasil Uji F

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 08/05/19 Time: 20:37

Sample: 1 60

Included observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	72937.21	1057.465	8.97366	0.0000
X1	53.83822	2.643027	1.36991	1.8143
X2	45.20901	2.018021	3.40264	0.0000
X3	0.223812	0.230043	1.12916	0.3350
<hr/>				
R-squared	0.703451	Mean dependent var	53297.57	
Adjusted R-squared	0.898279	S.D. dependent var	1773.813	
S.E. of regression	565.7364	Akaike info criterion	15.57847	
Sum squared resid	17923229	Schwarz criterion	15.71810	

Log likelihood	-463.3542	Hannan-Quinn criter.	15.63309
F-statistic	174.6717	Durbin-Watson stat	0.619739
Prob(F-statistic)	0.000000		

Hasil Uji T

Dependent Variable: Y

Method: Least Squares

Date: 08/05/19 Time: 20:37

Sample: 1 60

Included observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	72937.21	1057.465	8.97366	0.0000
X1	53.83822	2.643027	1.36991	1.8143
X2	45.20901	2.018021	3.40264	0.0000
X3	0.223812	0.230043	1.12916	0.3350
R-squared	0.703451	Mean dependent var	53297.57	
Adjusted R-squared	0.898279	S.D. dependent var	1773.813	
S.E. of regression	565.7364	Akaike info criterion	15.57847	
Sum squared resid	17923229	Schwarz criterion	15.71810	
Log likelihood	-463.3542	Hannan-Quinn criter.	15.63309	
F-statistic	174.6717	Durbin-Watson stat	0.619739	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Tabel Distribusi F

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	161	199	216	225	230	234	237	239	241	242	243	244	245	245
2	18.51	19.00	19.16	19.25	19.30	19.33	19.35	19.37	19.38	19.40	19.40	19.41	19.42	19.42
3	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.76	8.74	8.73	8.71
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.94	5.91	5.89	5.87
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.70	4.68	4.66	4.64
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.03	4.00	3.98	3.96
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.60	3.57	3.55	3.53
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.31	3.28	3.26	3.24
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.10	3.07	3.05	3.03
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.94	2.91	2.89	2.86
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.82	2.79	2.76	2.74
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.72	2.69	2.66	2.64
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.63	2.60	2.58	2.55
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.57	2.53	2.51	2.48
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.51	2.48	2.45	2.42
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.46	2.42	2.40	2.37
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.41	2.38	2.35	2.33
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.37	2.34	2.31	2.29
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.34	2.31	2.28	2.26
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.31	2.28	2.25	2.22
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.28	2.25	2.22	2.20
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.26	2.23	2.20	2.17
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.24	2.20	2.18	2.15
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.22	2.18	2.15	2.13
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.20	2.16	2.14	2.11
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.18	2.15	2.12	2.09
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.17	2.13	2.10	2.08
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.15	2.12	2.09	2.06
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.14	2.10	2.08	2.05
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.13	2.09	2.06	2.04
31	4.16	3.30	2.91	2.68	2.52	2.41	2.32	2.25	2.20	2.15	2.11	2.08	2.05	2.03
32	4.15	3.29	2.90	2.67	2.51	2.40	2.31	2.24	2.19	2.14	2.10	2.07	2.04	2.01
33	4.14	3.28	2.89	2.66	2.50	2.39	2.30	2.23	2.18	2.13	2.09	2.06	2.03	2.00
34	4.13	3.28	2.88	2.65	2.49	2.38	2.29	2.23	2.17	2.12	2.08	2.05	2.02	1.99
35	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16	2.11	2.07	2.04	2.01	1.99
36	4.11	3.26	2.87	2.63	2.48	2.36	2.28	2.21	2.15	2.11	2.07	2.03	2.00	1.98
37	4.11	3.25	2.86	2.63	2.47	2.36	2.27	2.20	2.14	2.10	2.06	2.02	2.00	1.97
38	4.10	3.24	2.85	2.62	2.46	2.35	2.26	2.19	2.14	2.09	2.05	2.02	1.99	1.96
39	4.09	3.24	2.85	2.61	2.46	2.34	2.26	2.19	2.13	2.08	2.04	2.01	1.98	1.95
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.04	2.00	1.97	1.95
41	4.08	3.23	2.83	2.60	2.44	2.33	2.24	2.17	2.12	2.07	2.03	2.00	1.97	1.94
42	4.07	3.22	2.83	2.59	2.44	2.32	2.24	2.17	2.11	2.06	2.03	1.99	1.96	1.94
43	4.07	3.21	2.82	2.59	2.43	2.32	2.23	2.16	2.11	2.06	2.02	1.99	1.96	1.93
44	4.06	3.21	2.82	2.58	2.43	2.31	2.23	2.16	2.10	2.05	2.01	1.98	1.95	1.92
45	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10	2.05	2.01	1.97	1.94	1.92
46	4.05	3.20	2.81	2.57	2.42	2.30	2.22	2.15	2.09	2.04	2.00	1.97	1.94	1.91
47	4.05	3.20	2.80	2.57	2.41	2.30	2.21	2.14	2.09	2.04	2.00	1.96	1.93	1.91
48	4.04	3.19	2.80	2.57	2.41	2.29	2.21	2.14	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90
49	4.04	3.19	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.08	2.03	1.99	1.96	1.93	1.90
50	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07	2.03	1.99	1.95	1.92	1.89
51	4.03	3.18	2.79	2.55	2.40	2.28	2.20	2.13	2.07	2.02	1.98	1.95	1.92	1.89
52	4.03	3.18	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.07	2.02	1.98	1.94	1.91	1.89
53	4.02	3.17	2.78	2.55	2.39	2.28	2.19	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88
54	4.02	3.17	2.78	2.54	2.39	2.27	2.18	2.12	2.06	2.01	1.97	1.94	1.91	1.88
55	4.02	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.06	2.01	1.97	1.93	1.90	1.88
56	4.01	3.16	2.77	2.54	2.38	2.27	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87
57	4.01	3.16	2.77	2.53	2.38	2.26	2.18	2.11	2.05	2.00	1.96	1.93	1.90	1.87
58	4.01	3.16	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.05	2.00	1.96	1.92	1.89	1.87
59	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.26	2.17	2.10	2.04	2.00	1.96	1.92	1.89	1.86
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.95	1.92	1.89	1.86

Tabel Distribusi T

Pr df	0.25 0.50	0.10 0.20	0.05 0.10	0.025 0.050	0.01 0.02	0.005 0.010	0.001 0.002
1	1.00000	3.07768	6.31375	12.70620	31.82052	63.65674	318.30884
2	0.81650	1.88562	2.91999	4.30265	6.96456	9.92484	22.32712
3	0.76489	1.63774	2.35336	3.18245	4.54070	5.84091	10.21453
4	0.74070	1.53321	2.13185	2.77645	3.74695	4.60409	7.17318
5	0.72669	1.47588	2.01505	2.57058	3.36493	4.03214	5.89343
6	0.71756	1.43976	1.94318	2.44691	3.14267	3.70743	5.20763
7	0.71114	1.41492	1.89458	2.36462	2.99795	3.49948	4.78529
8	0.70639	1.39682	1.85955	2.30600	2.89646	3.35539	4.50079
9	0.70272	1.38303	1.83311	2.26216	2.82144	3.24984	4.29681
10	0.69981	1.37218	1.81246	2.22814	2.76377	3.16927	4.14370
11	0.69745	1.36343	1.79588	2.20099	2.71808	3.10581	4.02470
12	0.69548	1.35622	1.78229	2.17881	2.68100	3.05454	3.92963
13	0.69383	1.35017	1.77093	2.16037	2.65031	3.01228	3.85198
14	0.69242	1.34503	1.76131	2.14479	2.62449	2.97684	3.78739
15	0.69120	1.34061	1.75305	2.13145	2.60248	2.94671	3.73283
16	0.69013	1.33676	1.74588	2.11991	2.58349	2.92078	3.68615
17	0.68920	1.33338	1.73961	2.10982	2.56693	2.89823	3.64577
18	0.68836	1.33039	1.73406	2.10092	2.55238	2.87844	3.61048
19	0.68762	1.32773	1.72913	2.09302	2.53948	2.86093	3.57940
20	0.68695	1.32534	1.72472	2.08596	2.52798	2.84534	3.55181
21	0.68635	1.32319	1.72074	2.07961	2.51765	2.83136	3.52715
22	0.68581	1.32124	1.71714	2.07387	2.50832	2.81876	3.50499
23	0.68531	1.31946	1.71387	2.06866	2.49987	2.80734	3.48496
24	0.68485	1.31784	1.71088	2.06390	2.49216	2.79694	3.46678
25	0.68443	1.31635	1.70814	2.05954	2.48511	2.78744	3.45019
26	0.68404	1.31497	1.70562	2.05553	2.47863	2.77871	3.43500
27	0.68368	1.31370	1.70329	2.05183	2.47266	2.77068	3.42103
28	0.68335	1.31253	1.70113	2.04841	2.46714	2.76326	3.40816
29	0.68304	1.31143	1.69913	2.04523	2.46202	2.75639	3.39624
30	0.68276	1.31042	1.69726	2.04227	2.45726	2.75000	3.38518
31	0.68249	1.30946	1.69552	2.03951	2.45282	2.74404	3.37490
32	0.68223	1.30857	1.69389	2.03693	2.44868	2.73848	3.36531
33	0.68200	1.30774	1.69236	2.03452	2.44479	2.73328	3.35634
34	0.68177	1.30695	1.69092	2.03224	2.44115	2.72839	3.34793
35	0.68156	1.30621	1.68957	2.03011	2.43772	2.72381	3.34005
36	0.68137	1.30551	1.68830	2.02809	2.43449	2.71948	3.33262
37	0.68118	1.30485	1.68709	2.02619	2.43145	2.71541	3.32563
38	0.68100	1.30423	1.68595	2.02439	2.42857	2.71156	3.31903
39	0.68083	1.30364	1.68488	2.02269	2.42584	2.70791	3.31279
40	0.68067	1.30308	1.68385	2.02108	2.42326	2.70446	3.30688
41	0.68052	1.30254	1.68288	2.01954	2.42080	2.70118	3.30127
42	0.68038	1.30204	1.68195	2.01808	2.41847	2.69807	3.29595
43	0.68024	1.30155	1.68107	2.01669	2.41625	2.69510	3.29089
44	0.68011	1.30109	1.68023	2.01537	2.41413	2.69228	3.28607
45	0.67998	1.30065	1.67943	2.01410	2.41212	2.68959	3.28148
46	0.67986	1.30023	1.67866	2.01290	2.41019	2.68701	3.27710
47	0.67975	1.29982	1.67793	2.01174	2.40835	2.68456	3.27291
48	0.67964	1.29944	1.67722	2.01063	2.40658	2.68220	3.26891
49	0.67953	1.29907	1.67655	2.00958	2.40489	2.67995	3.26508
50	0.67943	1.29871	1.67591	2.00856	2.40327	2.67779	3.26141
51	0.67933	1.29837	1.67528	2.00758	2.40172	2.67572	3.25789
52	0.67924	1.29805	1.67469	2.00665	2.40022	2.67373	3.25451
53	0.67915	1.29773	1.67412	2.00575	2.39879	2.67182	3.25127
54	0.67906	1.29743	1.67356	2.00488	2.39741	2.66998	3.24815
55	0.67898	1.29713	1.67303	2.00404	2.39608	2.66822	3.24515
56	0.67890	1.29685	1.67252	2.00324	2.39480	2.66651	3.24226
57	0.67882	1.29658	1.67203	2.00247	2.39357	2.66487	3.23948
58	0.67874	1.29632	1.67155	2.00172	2.39238	2.66329	3.23680
59	0.67867	1.29607	1.67109	2.00100	2.39123	2.66176	3.23421
60	0.67860	1.29582	1.67065	2.00030	2.39012	2.66028	3.23171